

**IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG  
KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK TERHADAP MASYARAKAT  
DI DESA BONE-BONE KECAMATAN BARAKA  
KABUPATEN ENREKANG**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Strata Satu Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik  
pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**NURUL QALBI WULANSARI MUSLIMIN**  
NIM: 30600111072  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

**JURUSAN ILMU POLITIK**

**FAKULTAS USHULUDDIN, FILSAFAT DAN POLITIK**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2016**

## KATA PENGANTAR

### السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada seluruh umat manusia. Shalawat dan salam diperuntukkan kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabat, serta kepada umatnya yang akan selalu setia mengikuti petunjuk-petunjuknya hingga akhir zaman, amin.

Atas, rahmat dan hidayah Allah swt. penulis telah menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk perjuangan selama penulis menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul **Implementasi Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok Terhadap Masyarakat di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, olehnya itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

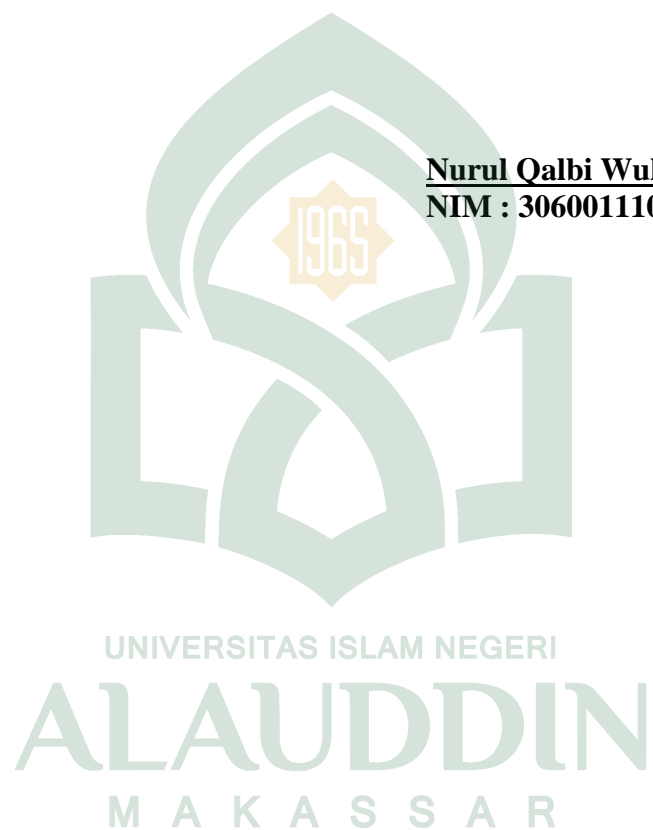
1. Bapak Muslimin Sakka dan Ibu Wardanriani Dahyar, selaku orang tua tercinta yang telah banyak memberikan dorongan spiritual, moril dan materil kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Natsir, MA., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

5. Bapak Syahrir Karim, S. Ag, M. Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Bapak Drs. H. Ibrahim, M.Pd selaku Pembimbing I dan Ibu Hikmawati S.Pd.I., M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Ramli, M. Si selaku Penguji I dan Ibu Ismah Tita Ruslin, S. IP, M. Si selaku Penguji II.
8. Dosen Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
9. Karyawan dan Staf Akademik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama ini.
10. Bapak Kepala Desa Bone-Bone beserta Staf, atas data-data dan informasi yang telah diberikan pada penulis.
11. Bapak dan Ibu yang menjadi informan peneliti, atas kesediaannya untuk diwawancara dan atas data-data yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya teman-teman jurusan Ilmu Politik angkatan 2011.
13. Kepada kakak Nur Fitrawan, Nur Afnitasari, Nur Akhmed Septiawan dan adik Nur Rezka Novasari tercinta, yang selalu memberikan keceriaan, canda tawa, inspirasi dan semangatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt. selalu memberikan balasan yang terbaik kepada semuanya. Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan umumnya kepada para pembaca, amin.

Samata, 24 November 2015

Penulis



**Nurul Qalbi Wulansari Muslimin**  
**NIM : 30600111072**

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
ABSTRAK .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	11
E. Kerangka Teori .....	14
F. Metode Penelitian .....	24
<b>BAB II : PROFIL DESA BONE-BONE KEC. BARAKA KAB. ENREKANG</b>	
A. Profil Kabupaten Enrekang .....	28
B. Profil Kecamatan Baraka .....	30
C. Profil Desa Bone-Bone .....	32
D. Aspek Demografi Desa Bone-Bone .....	34
E. Struktur Pemerintahan Desa Bone-Bone .....	39
F. Kondisi Sosial Budaya Desa Bone-Bone .....	46
<b>BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Implementasi Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok oleh Pemerintah terhadap Masyarakat di Desa Bone-Bone .....	48
1. Sosialisasi Langsung .....	49

2. Sosialisasi Tidak Langsung .....	51
B. Dampak Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok terhadap Masyarakat di Desa Bone-Bone	55
1. Dampak Peraturan Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 Terhadap Lingkungan .....	58
2. Dampak Peraturan Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 bagi Kesehatan .....	61
3. Dampak Peraturan Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 bagi Perokok Aktif .....	64
4. Dampak Peraturan Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 bagi Perokok Pasif/Bukan Perokok .....	70
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	76
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

	Halaman
1. Tabel 1.1 : Luas Daerah Tiap Kecamatan di Kabupaten Enrekang	27
2. Tabel 1.2 : Luas, Jarak, dan Klasifikasi Desa/Kelurahan di Kecamatan Baraka Tahun 2012	29
3. Tabel 1.3 : Sarana dan Prasarana Desa Bone-Bone	31
4. Tabel 1.4 : Jumlah Penduduk di Setiap Dusun	32
5. Tabel 1.5 : Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Bone-Bone	33
6. Tabel 1.6 : Wajib Belajar 9 Tahun	34
7. Tabel 1.7 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	35
8. Tabel 1.8 : Mata Pencaharian	36
9. Gambar 2.1 : Bagan Struktur Organisasi Desa Bone-Bone	40

## ABSTRAK

Nama Penulis : NURUL QALBI WULANSARI MUSLIMIN

NIM : 30600111072

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DESA NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK TERHADAP MASYARAKAT DI DESA BONE-BONE KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG

---

Skripsi ini berjudul Implementasi Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok Terhadap Masyarakat di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Judul ini dilatarbelakangi karena adanya penyimpangan terhadap peraturan desa tentang kawasan bebas asap rokok. Fokus masalah penelitian ini adalah kesenjangan antara peraturan desa dengan perilaku masyarakat setempat, sehingga yang menjadi masalah inti adalah penerapan dan dampak peraturan desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan Implementasi Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok terhadap masyarakat di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Metode penelitian yang diterapkan meliputi wawancara, observasi, dan dokumenter. Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok di wilayah Desa Bone-Bone penerapannya belum efektif. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menerapkan kebijakan tersebut mulai dari sosialisasi secara langsung atau dengan penggunaan media seperti poster, spanduk, dan stiker. Namun hasilnya kurang maksimal. Terbukti masih ditemukan masyarakat yang merokok secara sembunyi-sembunyi seperti di kebun dan di rumah, meski hal tersebut sudah dilarang dan diberlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Beberapa dampak yang dihasilkan oleh penerapan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009, yaitu : 1) Dampak terhadap Lingkungan, seperti menjadikan ruang dan lingkungan desa yang sehat dan bersih ; 2) Dampak terhadap Kesehatan, seperti melindungi kesehatan anak-anak dan ibu-ibu, memperbaiki tingkat kesehatan warga dan menekan angka kematian ; 3) Dampak terhadap Perokok Aktif, seperti membantu mereka untuk menjauhi dan berhenti dari merokok ; 4) Dampak Terhadap Perokok Pasif/Bukan Perokok, seperti para perokok pasif mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih serta jauh dari udara yang terkontaminasi virus dan bibit penyakit.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Desa, dan Masyarakat Desa Bone-Bone



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan dalam undang-undang ini, bahwa pemberian otonom kepada daerah harus didasarkan pada faktor-faktor dan tindakan atau kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangganya sendiri serta bertanggungjawab.<sup>1</sup>

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang dibuat dalam suasana “reformasi” hanya bertahan 5 tahun. Dari praktek selama 5 tahun ternyata Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 telah melahirkan banyak persoalan, penyelewengan keuangan alias korupsi dan miskomunikasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan juga antar Pemerintah Daerah. Menghadapi permasalahan otonomi daerah yang multi segi ini maka sejak tahun 2002 telah beredar kampanye untuk merevisi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>2</sup>

Sesuai isi konsideran Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menimbang, “bahwa Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti.” Pergantian Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 telah didahului dengan penggantian undang-undang

---

<sup>1</sup> Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia di Lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005), h. 83-84

<sup>2</sup> B.N. Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses & Realita: Perkembangan Otda, Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini*, h. 123

bidang politik yaitu: Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum diperbarui dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu; Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Sudut pandang sosial budaya, desa dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah kebijakan penyeragaman bentuk, sifat, karakteristik, dan struktur pemerintah desa. Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 ini masih mewarisi semangat otonomi desa di mana secara tegas mengakui desa berhak menyelenggarakan urusan rumah

---

<sup>3</sup> B.N. Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses & Realita: Perkembangan Otda, Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010), h. 123-124

<sup>4</sup> B.N. Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses & Realita: Perkembangan Otda, Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini*, h. 179

tangganya sendiri. Dalam pelaksanaannya desa ditempatkan sebagai organisasi pemerintahan terendah di bawah kecamatan. Dengan demikian segala keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah desa menjadi tidak berlaku jika belum mendapat persetujuan pemerintah kecamatan. Namun dalam prakteknya, secara substansial undang-undang tersebut bukan saja sekedar mengatur desa, tetapi juga mengurangi otonomi desa yang telah ada sejak dahulu kala.<sup>5</sup>

Memasuki era reformasi setelah runtuhnya rezim Soeharto, usaha-usaha untuk mewujudkan otonomi daerah dan otonomi desa menjadi mengemuka. Tuntutan masyarakat luas untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam kerangka hubungan antara pusat dengan daerah semakin marak, bahkan kadang-kadang menggoyahkan stabilitas dan integrasi bangsa. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi, berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, dan berhak dalam menyelenggarakan serta mengatur rumah tangganya sendiri, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 69 berisi tentang (1) Jenis peraturan di desa terdiri atas peraturan

---

<sup>5</sup> Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa: Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 15

desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (3) Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>6</sup>

Pemerintahan desa memiliki struktur sebagaimana fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan. Oleh karena itu, dalam setiap desa atau kelurahan memiliki sosok pemimpin yang mengatur jalannya pemerintahan desa. Melalui kepemimpinan kepala desa diharapkan dapat memberikan hasil yang terbaik serta maksimal terhadap masyarakatnya. Kepemimpinan harus memiliki kemampuan serta memberikan contoh yang baik terhadap masyarakatnya. Kemampuan disini dimaksudkan untuk mempengaruhi masyarakat agar melaksanakan perintah pemimpinnya. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.

Kepemimpinan yang berada di desa/kelurahan memiliki pengaruh yang cukup besar karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka harus memiliki kemampuan-kemampuan khusus dalam mempengaruhi masyarakatnya.<sup>7</sup> Jabatan tertinggi di desa yang memiliki wewenang untuk mengatur jalannya

---

<sup>6</sup> *Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 43-44

<sup>7</sup> Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1995), h.

pemerintahan di desa adalah kepala desa. Kepala desa merupakan orang yang mempunyai kekuasaan yang sah menyangkut urusan desa.<sup>8</sup>

Pentingnya jabatan kepala desa memberikan makna tersendiri bagi masyarakatnya. Berbagai peran yang dimiliki oleh kepala desa harus dijalankan sebagaimana mestinya baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang mencakup lingkup area yang menjadi kewenangannya. Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakatnya.<sup>9</sup>

Peran kepemimpinan dalam efektivitas pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan melakukan upaya-upaya memberikan bimbingan dan pengarahan, mempengaruhi perasaan dan perilaku orang lain, serta menggerakkan orang lain sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama, dan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus diperhatikan dan ditindak lanjuti oleh seorang kepala desa agar apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang merupakan suatu kawasan percontohan untuk daerah/desa sehat yang sudah terkenal baik dalam negeri maupun mancanegara. Untuk menciptakan/membangun desa yang sehat bukanlah hal yang mudah bagi kepala desa Bone-Bone. Butuh tekad dan kerja

---

<sup>8</sup>Hans Antlov dan Sven Cederroth, *Kepemimpinan Jawa*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2001), h. 108

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 213

keras untuk mewujudkan hal tersebut. Diperlukan pengetahuan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat dan menjaga lingkungan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka.

Peraturan Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Bone-Bone yang melarang masyarakat desa Bone-Bone dan masyarakat dari daerah lain untuk merokok, menjual, dan mengiklankan produk rokok/tembakau di desa Bone-Bone. Latar belakang terbentuknya aturan ini didasari atas kekhawatiran dari para tokoh masyarakat dengan kondisi masyarakat desa Bone-Bone yang sudah sangat terbiasa dengan rokok, dimana rokok bukan hanya dinikmati oleh orang dewasa saja tapi juga di konsumsi oleh anak-anak yang masih berusia 6-12 tahun.

Peraturan desa Bone-bone nomor 1 tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok memberlakukan larangan kepada masyarakat desa Bone-Bone untuk tidak merokok di seluruh kawasan desa Bone-Bone. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Desa Bone-Bone No.1 Tahun 2009 Bab V Pasal 8 yang berbunyi, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan atau aktifitas merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan rokok di wilayah desa Bone-Bone.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Peraturan Desa Bone-Bone Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok. Bab V Pasal 8, h. 5

Dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an bahwa:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ  
فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ



Terjemahannya:

*“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Al-Baqarah: 30)<sup>11</sup>*

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa khalifah (pemimpin) adalah pemegang mandat Allah SWT untuk mengemban amanah dan kepemimpinan langit di muka bumi. Pemimpin haruslah baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain dalam upaya mencari ridha Allah SWT, serta dapat memelihara, memakmurkan, melestarikan alam, menggali, mengelola alam demi terwujudnya kesejahteraan segenap umat manusia.

Kepala Desa Bone-Bone menerapkan aturan yang telah disepakati dan dituangkan dalam Peraturan Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang yaitu Peraturan Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok, Peraturan Desa Bone-Bone No. 2 Tahun 2009 tentang pelestarian hutan, Peraturan Desa Bone-Bone No. 3 Tahun 2009 tentang larangan memasukkan dan mengkonsumsi makanan atau bahan makanan yang

---

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia: Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 13

mengandung zat pewarna sintetik dan bahan kimia berbahaya lainnya di wilayah Desa Bone-Bone, dan Peraturan Desa Bone-Bone No. 4 Tahun 2009 tentang kawasan bebas ayam ras dan limbah asal unggas.<sup>12</sup>

Keempat Peraturan Desa tersebut yang telah diterapkan di Desa Bone-Bone, penulis tertarik untuk mengetahui salah satu dari empat peraturan desa Bone-Bone yaitu Peraturan Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok. Mengenai peraturan desa Bone-Bone tersebut adalah menjadikan desa Bone-Bone sebagai desa yang bebas asap rokok. Aturan ini tidak hanya diterapkan bagi penduduk desa Bone-Bone, tetapi juga berlaku bagi para tamu pendatang. Namun masih ada segelintir masyarakat yang menyimpang dari hal tersebut. Walaupun Pemerintah Desa telah memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar peraturan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengeluarkan fatwa haram merokok. Melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke III, ditetapkan bahwa merokok adalah haram bagi anak-anak, ibu hamil, dan merokok di tempat-tempat umum. Alasan pengharaman ini karena merokok termasuk perbuatan mencelakakan diri sendiri. Merokok lebih banyak madaratnya ketimbang manfaatnya.<sup>13</sup>

Ditinjau dari aspek agama, maka kriteria dasar dari yang diharamkan oleh Allah SWT. adalah segala sesuatu yang *at-thayyibah*, artinya yang serba baik dan bermanfaat serta positif baik untuk diri sendiri maupun orang lain, untuk keluarga, keturunan, jiwa, pikiran dan kesucian diri serta agama. Karenanya menghiasi

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintahan Kabupaten Enrekang Kecamatan Baraka Desa Bone-Bone

<sup>13</sup> Muhammad Ronnurus Siddiq, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pengharaman Merokok." <http://digilib.uin-suka.ac.id/3883/1/BAB%20I.V.pdf> (15 Februari 2015)



kehidupan dengan yang serba *halalan-thayyiban* merupakan keberuntungan dan sebaliknya, apabila kehidupan kita ini diisi dengan hal-hal yang haram adalah jalan yang merugikan.<sup>14</sup> Umat Islam diperintahkan hanya untuk mengonsumsi dan memproduksi yang halal sesuai dengan firman Allah Swt.,

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahannya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Al-Baqarah: 168)<sup>15</sup>

Didahulukannya dengan menyebut *ma'ruf* kemudian *munkar*, demikian juga tentang *thayyibat* dan *khabaits*, mengandung makna bahwa Allah mengutus Nabi untuk membimbing umatnya agar bisa memilih yang baik-baik dan menjauhi hal-hal yang buruk atau *khabaits*, terutama berkenaan dengan makanan dan minuman serta menyuruh umatnya agar selalu melakukan yang *ma'ruf* dan bisa mencegah kemunkaran di muka bumi ini.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan memfokuskan penelitian ini pada: “Implementasi Peraturan Desa

<sup>14</sup> Muchtar A.F, *Matikan Rokok Hidupkan Semangat: Menuju Jalan Hidup Sehat Bermakna*, (Bandung: Amanah Publishing House, 2005), h. 99-100

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia: Al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 41

<sup>16</sup> Muchtar A.F, *Matikan Rokok Hidupkan Semangat: Menuju Jalan Hidup Sehat Bermakna*, h. 101

No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok terhadap Masyarakat di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai fokus penelitian penulis adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok oleh Pemerintah terhadap Masyarakat di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana Dampak Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok terhadap Masyarakat di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian tentang Implementasi Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok terhadap Masyarakat di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan dan dampak Peraturan Desa Bone-Bone terhadap masyarakat di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dan daerah terkait hal-hal yang dilakukan dalam membangun desa/daerah yang sehat dan sejahtera.

2. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Implementasi Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok terhadap Masyarakat di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan. Khususnya terhadap ilmu sosial dan politik.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka dalam penelitian kualitatif merupakan sesuatu yang penting. Tujuan utama kajian pustaka dalam penelitian kualitatif adalah untuk menghindari kesamaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka penulis mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Tidak ada yang secara rinci membahas tentang implementasi peraturan desa No. 1 tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok terhadap masyarakat. Namun ada beberapa yang membahas dengan objek penelitian di desa yang mirip. Di antaranya, yaitu:

1. **“Pelaksanaan Peraturan Kawasan Bebas Asap Rokok Pada Tempat Umum Sebagai Perwujudan Hak Atas Kesehatan Masyarakat”**, oleh **Zakiah Darajat**. Penulisan skripsi ini bertujuan mengetahui materi muatan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang kawasan bebas asap rokok, pelaksanaan peraturan kawasan bebas asap rokok pada tempat umum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk mentaati peraturan kawasan bebas asap rokok.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Metode pengumpulan data yang

digunakan adalah pengamatan kuesioner dan wawancara. Lokasi penelitian di Kota Makassar pada Mall Panakukang, Grand Clarion Hotel & Convention, dan Hotel Anging Mammiri. Pengambilan sampel secara purposif dengan jumlah responden/informan sebanyak 145 orang yang terdiri pengunjung/customer mall dan tamu hotel, pengelola termasuk General Manager mall dan hotel, DPRD Kota Makassar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar, dan Dinas Kesehatan Kota Makassar.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masih terdapat materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Kawasan Bebas Asap Rokok yang belum harmonis dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, pelaksanaan kawasan bebas asap rokok belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Namun Grand Clarion Hotel & Convention telah memilah kamar dengan smooking room dan no smooking room serta faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk mentaati peraturan adalah pengetahuan tentang peraturan isinya dan memahami bahaya merokok dan asap rokok, perilaku hukum dan petugas atau tenaga yang menegakkan aturan. Selain itu, faktor lingkungan, takut sanksi, memahami tujuan peraturan juga mempengaruhi orang untuk mentaati peraturan.

2. **“Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Perlindungan Masyarakat Terhadap Paparan Asap Rokok Untuk Mencegah Penyakit Terkait Rokok”**, oleh **Agus Supriyadi**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya kawasan tanpa rokok sebagai perlindungan paparan asap rokok orang lain

untuk mencegah penyakit terkait rokok. Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan analisis pustaka dan pelaporan penelitian. Dengan mengumpulkan artikel, jurnal, dan buku yang sudah dipublikasikan kemudian dianalisa oleh penulis.

Hasil penelitian adanya paparan asap rokok yang terhirup orang lain. Sedangkan paparan asap rokok orang lain mengandung kandungan berbahaya dalam tubuh. Jadi perlunya pengendalian asap rokok dengan Implementasi Kawasan Bebas Rokok. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu asap rokok orang lain itu mematikan. Tidak ada batasan aman bagi paparan asap rokok orang lain. Hanya lingkungan tanpa asap rokok 100% (KTR) yang dapat memberikan perlindungan penuh bagi masyarakat.

3. **“Implementasi Kebijakan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Selayar (Studi Kasus Perbandingan Selayar Daratan dan Selayar Kepulauan)”**, oleh **Sukri**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Selayar, mengetahui implementasi kebijakan kesehatan pemerintah Kabupaten antara Selayar Daratan Dan Selayar Kepulauan serta faktor-faktor yang membedakan penerapan kebijakan antara Selayar Daratan dan Selayar Kepulauan pada bidang kesehatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada masyarakat Kabupaten Selayar cukup mudah terserang penyakit, namun dibanding Selayar Daratan daerah Kepulauan lebih mudah terjangkit penyakit. Kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan dalam hal jumlah tenaga medis, jumlah puskesmas, posyandu, fasilitas yang lainnya menunjukkan bahwa untuk daerah

Kepulauan lebih sedikit dibanding Daratan sementara tingkat kebutuhan cenderung sama. Hambatan-hambatan yang ditemukan yaitu persoalan dana yang minim, transportasi, dan komunikasi.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada analisis yang digunakan serta dimensi ruang dan tempat dimana peneliti melakukan penelitian di Desa Bone-Bone, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang. Untuk itu, peneliti mencoba melihat tentang implementasi peraturan desa No. 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok terhadap masyarakat. Kemudian jika dikaitkan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, sama-sama membahas tentang kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Negara**

Berbagai literatur yang telah dikembangkan dan telah diperbanyak jumlahnya untuk dipublikasikan, maka konsep atau teori suatu negara tidak pernah dilupakan dan ditinggalkan begitu saja. Sebab negara merupakan suatu integrasi dari kekuasaan politik, negara merupakan suatu kelompok organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Maksudnya adalah manusia hidup dalam suasana kerjasama sekaligus dalam suasana antagonis dan penuh pertentangan. Di samping hal itu, negara merupakan organisasi yang dalam suatu wilayah dapat

memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.

Negara pula menetapkan tujuan dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara itu sendiri. Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya kearah tujuan bersama. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa negara mempunyai dua tugas yaitu:

- a. Mengendalikan dan mengatur segala gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain sehingga tidak menjadi antagonis yang membahayakan.
  - b. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya.
- Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.<sup>17</sup>

Pengendalian ini dilakukan karena berdasarkan sistem hukum dan dengan perantara pemerintah beserta segala alat perlengkapannya. Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur, maka dari itu semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan harus dapat menempatkan diri dalam rangka kegiatan yang sebenarnya sesuai tujuan-tujuan negara.

---

<sup>17</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 46-47

## 2. Teori Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn teori kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat *politis*. Aktivitas politik tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.<sup>18</sup>

Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda), atau tahap di tengah, dalam lingkaran aktivitas yang tidak linear.<sup>19</sup>

Hal tersebut akan dilakukan untuk menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang ada dalam tahap proses pembuatan kebijakan. Tahap-tahap yang dikemukakan oleh William N. Dunn akan menjelaskan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi dalam suatu wilayah yang diteliti oleh penulis.

### a. Tahap Pembentukan Agenda

Tahap pembentukan agenda (*setting agenda process*) adalah tahapan yang mendasar berkaitan dengan pola-pola tindakan pemerintah yang spesifik

---

<sup>18</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), h. 22.

<sup>19</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, h. 23



sifatnya yang digunakan untuk memproyeksikan isu-isu yang dinilai harus ditangani demi menjawab kepentingan umum. Tahapan ini sangat terkait dengan proses masuknya berbagai permasalahan dasar ke dalam proses kebijakan yang nantinya akan dicermati secara seksama sebelum mendapat perhatian lebih lanjut. Banyaknya permasalahan yang muncul dalam tahap ini menyebabkan berbagai permasalahan tersebut akan dikompertisikan oleh tiap aktor agar mendapatkan perhatian utama untuk dimasukkan ke dalam agenda kebijakan.<sup>20</sup>

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Tahap ini merupakan suatu langkah awal yang menentukan keberhasilan proses pembuatan kebijakan selanjutnya. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa pada tahap ini rancangan kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan mulai dibuat sesuai dengan masalah yang ada dan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pada tahap ini diperlukan keahlian, ketelitian, dan kecermatan serta ketepatan dari para pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan sesuai dengan permasalahan yang telah disepakati.

Secara proses, tahapan ini akan menunjukkan adanya proses tawar-menawar (*bargaining*) ataupun *lobby* di antara para aktor kebijakan sebagai salah satu kunci dari proses ini. Sangat mungkin terjadi formulasi kebijakan yang diambil bukanlah merupakan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah

---

<sup>20</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, h. 26.

lingkungan melainkan merupakan pilihan rasional yang mengakomodasi tuntutan berbagai aktor yang terlibat dalam proses ini.<sup>21</sup>

c. Tahap Legitimasi Kebijakan

Tahap ini berlangsung upaya untuk memilih suatu rancangan kebijakan tertentu melalui proses pembahasan formal yang pada gilirannya akan disahkan sebagai suatu kebijakan. Pada tahap ini formulasi kebijakan yang telah dipilih akan diberi kekuatan hukum yang mengikat sehingga segera dapat diterapkan.

Beberapa kebijakan tidak membutuhkan proses legitimasi dan dapat langsung dianggap sah karena telah dibuat oleh pembuat kebijakan yang merupakan pejabat negara. Akan tetapi sebagian kebijakan lain memang masih membutuhkan suatu pengesahan dari lembaga tertentu untuk dapat disahkan. Pada tahap ini aktor formal yakni pemerintah, memegang peran penting karena mendapatkan mandat konstitusi.<sup>22</sup>

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan pada tahap ini akan dilaksanakan sesuai dengan *policy statement*. Tahap ini sangat krusial karena suatu kebijakan publik akan langsung dinilai pada konteks penerapannya. Keberhasilan suatu kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari *policy statement* saja, akan tetapi keberhasilannya dinilai setelah *policy statement* tersebut diimplementasikan. Meskipun suatu *policy statement* sangat ideal, akan tetapi dapat saja gagal mencapai tujuannya karena kesalahan dalam implementasi.

---

<sup>21</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, h. 27.

<sup>22</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, h. 27

Terkait dengan implementasi kebijakan, paling tidak ada empat elemen penting untuk dicermati yakni; siapa pelaksana kebijakan, hakekat dari proses administratif, kepatuhan pada kebijakan dan dampak dari implementasinya. Keempat tahapan tersebut tentu saja berkaitan dengan aktor yang terlibat atau bersinggungan dengan proses implementasi kebijakan tersebut baik itu sebagai implementornya maupun elemen masyarakat yang menjadi obyek kebijakan.<sup>23</sup>

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Tahap evaluasi berisi rangkaian proses untuk melakukan penilaian dari suatu kebijakan tertentu baik yang sedang atau telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah suatu kebijakan akan dilanjutkan, dirubah atau dibatalkan. Paling tidak ada tiga elemen penting yang dipakai dalam menganalisa kebijakan yakni; *Pertama*, siapa yang memperoleh akses terhadap *input* dan *output* kebijakan tersebut, *Kedua* bagaimana reaksi terhadap kegiatan tersebut dan *Ketiga* bagaimana kebijakan dapat merubah perilaku mereka. Kegiatan evaluasi merupakan wewenang dari pemerintah, namun seringkali banyak pihak di luar pemerintah yang melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan dengan berbagai alasan atau target yang ingin dicapai.<sup>24</sup>

Sebuah kebijakan, mau tidak mau pastilah menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun maupun negatif. Dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. Sedangkan

---

<sup>23</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, h. 28

<sup>24</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, h. 28-29

dampak negatif dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi.

William N. Dunn menyebutkan setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam menentukan alternatif terpilih, antara lain:

- 1) Effectiveness, yaitu apakah kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran yang telah dirumuskan.
- 2) Efficiency, yaitu apakah kebijakan yang akan diambil itu seimbang dengan sumber daya yang tersedia.
- 3) Adequacy, yaitu apakah kebijakan itu sudah cukup memadai untuk memecahkan masalah yang ada.<sup>25</sup>

### **3. Desentralisasi**

Menurut badan otonom PBB, UNDP, desentralisasi merujuk pada restrukturisasi atau reorganisasi wewenang sehingga ada sebuah sistem tanggung jawab bersama antara institusi pemerintah pada tingkat pusat dan daerah menurut prinsip subsidiaritas, sehingga bisa meningkatkan keseluruhan kualitas dan keefektifan sistem pemerintahan, dan juga meningkatkan wewenang dan kapasitas daerah. Dengan desentralisasi, diharapkan mampu memberikan peluang bagi terciptanya pemerintahan yang baik, seperti meningkatkan peluang masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi, sosial, dan berbagai keputusan politik; membantu kapasitas rakyat yang masih dalam taraf berkembang, dan memperluas tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Syamsuri, "Dampak Kebijakan Publik". [http://kebijakanpublik12.Blogspot.com/2012\\_0401archive.html](http://kebijakanpublik12.Blogspot.com/2012_0401archive.html), (diakses 06 Juni 2015)

<sup>26</sup> Muhammad Noor, *Memahami Desentralisasi Indonesia*, (Yogyakarta: Interpena, 2012), h. 5

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Pilihan terhadap desentralisasi haruslah dilandasi argumentasi yang kuat, baik secara teoritis maupun secara empiris. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya dan tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.

Logemann dalam Tjahya Supriatna, memasukkan dekosentrasi sebagai bagian dari desentralisasi. Dengan demikian desentralisasi mempunyai arti yang luas. Logemann, membagi desentralisasi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Dekosentrasi atau desentralisasi jabatan, yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat kelengkapan negara yang tingkatannya lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Misalnya, pelimpahan dari menteri kepada gubernur, dari gubernur kepada bupati/walikota dan seterusnya secara berjenjang. Desentralisasi semacam ini rakyat atau lembaga perwakilan rakyat daerah tidak ikut campur.
- b. Desentralisasi ketatanegaraan yang sering juga disebut sebagai desentralisasi politik, yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di lingkungannya. Dalam desentralisasi politik semacam ini, rakyat dengan menggunakan dan memanfaatkan saluran-saluran tertentu (perwakilannya) ikut serta di dalam pemerintahan, dengan batas wilayah daerah masing-masing.<sup>27</sup>

Selanjutnya Bryan & White dalam Kaputra Iswan dkk, mengemukakan bahwa desentralisasi mempunyai dua makna:

---

<sup>27</sup>Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Bumi akasara, 1996), h. 20

- a. Pelimpahan wewenang (delegation) yang mencakup penyerahan tanggung jawab kepada bawahan untuk mengambil keputusan berdasar kasus yang dihadapi, tetapi pengawasan tetap berada di tangan pusat.
- b. Pengalihan kekuasaan (devolution) yakni seluruh tanggung jawab untuk kegiatan tertentu diserahkan kepada penerima wewenang.<sup>28</sup>

Pakar lain, Rondinelli & Cheema dalam Kaputra Iswan dkk, mengemukakan bahwa desentralisasi dilihat dari sudut pandang kebijakan dan administrasi adalah transfer perencanaan, pengambilan keputusan, atau otoritas administratif dari pemerintahan pusat kepada organisasinya di lapangan, unit-unit administratif lokal, organisasi semi otonom, dan organisasi parastatal, pemerintahan lokal, atau organisasi non-pemerintah (NGO/LSM).<sup>29</sup>

Berdasarkan pengalaman empiris, desentralisasi mengandung dua unsur pokok. Unsur yang pertama adalah terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah. Unsur yang kedua adalah penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom. Dalam negara kesatuan seperti Indonesia, kedua unsur tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui produk hukum dan konstitusi dan melembaga.<sup>30</sup>

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi

---

<sup>28</sup>Kaputra Iswan dkk, *Dampak Otonomi Daerah: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 68

<sup>29</sup>Kaputra Iswan dkk, *Dampak Otonomi Daerah: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, h. 68

<sup>30</sup>HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, h. 18

pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya desentralisasi menunjukkan sebuah bangunan vertikal dari bentuk kekuasaan negara. Di Indonesia dianutnya desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah.

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Otonomi daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh daerah melalui adanya otonomi daerah, akan memberikan “kebebasan” kepada daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis pemerintah daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan Implementasi Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok terhadap masyarakat di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Penelitian kualitatif deskriptif lebih

---

<sup>31</sup> Djohermansyah Djohan, *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*, Cet I (Jakarta, Bumi Aksara, 1990), h.52.

menekankan pada keaslian dan tidak bertolak dari teori tetapi dari fakta sebagaimana adanya di lapangan. Dengan kata lain, menekankan pada kenyataan yang benar-benar terjadi pada suatu tempat atau masyarakat tertentu yaitu pada masyarakat desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan, beserta jalan dan kotanya. Lokasi dalam penelitian ini berada di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Desa Bone-Bone merupakan hasil pemekaran dari Desa Pepandungan Kecamatan Baraka melalui Peraturan Daerah No. 34/2007 tanggal 29 September 2007.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Penulis dalam proses pengumpulan data, turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang sebenarnya dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam hasil penelitian yang akan diperoleh nantinya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data untuk tujuan penelitian dengan mengadakan tanya jawab kepada informan yang terdiri atas berbagai golongan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan akurat, tentang implementasi Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok terhadap masyarakat di Desa Bone-Bone tersebut. Secara khusus, wawancara adalah alat yang baik untuk menghidupkan topik riset. Wawancara juga merupakan metode bagus untuk pengumpulan data tentang subjek



kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang membahasnya.<sup>32</sup>

Penulis akan mewawancarai perwakilan dari:

- 1) Aparat desa: Kepala Desa dan Kepala Urusan Desa
- 2) Tokoh masyarakat: orang yang berpengaruh di desa Bone-Bone
- 3) Organisasi kemasyarakatan: club remaja
- 4) Pemilik kios penjualan/warung
- 5) Ibu Rumah Tangga
- 6) Petugas Kesehatan Desa: Perawat Pusat Kesehatan Desa

Informasi tersebut ditetapkan secara purposive sampling. Menurut Sugiyono, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut Margono, pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling, didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.<sup>33</sup>

b. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati.

Adapun yang menjadi bahan pengamatan yaitu:

- 1) Perilaku merokok masyarakat

---

<sup>32</sup> Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 104

<sup>33</sup> Sitti Mania, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 178

2) Kios-kios penjualan rokok

c. Dokumenter yaitu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun gambar.

#### **4. Jenis dan Sumber Data**

- a. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh dari informan penelitian, hasil observasi, dan wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan dan juga data dari pemerintah setempat.

Kedua data tersebut, akan membantu peneliti menganalisis secara kualitatif, kemudian diinterpretasi dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan. Dengan data yang didapatkan melalui implementasi peraturan desa No. 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok terhadap masyarakat di desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.

#### **5. Analisis Data**

- a. Menyusun data dilakukan dengan menggolongkan data kedalam pola, tema atau kategori sehingga dapat memberi makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antara berbagai konsep yang mencerminkan perspektif atau pandangan peneliti dan bukan kebenaran.
- b. Untuk menganalisis data maka dilakukan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam proses ini data disederhanakan sehingga lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan sehingga mampu menggali informasi yang lebih luas, mendetail, dan mendalam.

- c. Data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumenter.



## BAB II

### PROFIL DESA BONE-BONE KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG

#### A. Profil Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi. Kabupaten Enrekang terletak  $\pm$  235 Km di sebelah utara Kota Makassar. Secara geografis Kabupaten Enrekang terletak pada koordinat antara 3°14'3" LS sampai 3°50'00" LS dan 119°40'53" BT sampai 120°06'33" BT, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Enrekang mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- ) Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Toraja
- ) Sebelah Selatan : Kabupaten Luwu
- ) Sebelah Timur : Kabupaten Sidrap
- ) Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

Topografi wilayah kabupaten ini pada umumnya bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47-3.293 meter dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan topografi wilayah-wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang, sedangkan yang datar hanya 15,04%. Secara administrasi Kabupaten Enrekang terbagi atas beberapa Kecamatan, yang dibagi kedalam dua kawasan yaitu Kawasan Barat Enrekang (KBE) dan Kawasan Timur Enrekang (KTE). KBE meliputi Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Cendana, sedangkan

KTE meliputi Kecamatan curio, Kecamatan Malua, Kecamatan Baraka, Kecamatan Bungin dan Kecamatan Maiwa.

Luas KBE kurang lebih 659,03 Km<sup>2</sup> atau 36,90% dari luas Kabupaten Enrekang sedangkan luas KTE kurang lebih 1.126,98 Km<sup>2</sup> atau 63,10% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang. Adapun luas tiap Kecamatan di Kabupaten Enrekang, dapat di lihat pada tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1 Luas Daerah Tiap Kecamatan di Kabupaten Enrekang**

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Maiwa	392,87	22
2	Enrekang	236,84	6
3	Bungin	291,19	18
4	Cendana	91,01	7
5	Baraka	159,15	15
6	Buntu Batu	126,65	8
7	Anggeraja	125,34	15
8	Malua	40,36	8
9	Alla	34,66	8
10	Curio	178,51	11
11	Masalle	68,35	6
12	Baroko	41,08	5
Jumlah		1.786,01	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2013<sup>28</sup>

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat luas setiap Kecamatan di Kabupaten Enrekang. Yang mana Kecamatan Maiwa memiliki luas terbesar dengan 392,87

<sup>28</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Enrekang Dalam Angka Tahun 2013

Km<sup>2</sup>, sementara Kecamatan Alla memiliki luas wilayah yang terkecil dengan 34,66 Km<sup>2</sup>.

### **B. Profil Kecamatan Baraka**

Kecamatan Baraka merupakan salah satu Kecamatan dengan klasifikasi Desa/Kelurahan termasuk Desa/Kelurahan swadaya dan swakarya yang terletak di dalam wilayah administrasi Kabupaten Enrekang dan merupakan wilayah bukan pantai, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 159,150 Km<sup>2</sup> yang terbagi atas 15 Desa/Kelurahan.

Kecamatan Baraka secara geografis terletak antara 3°32'00" LS sampai 3°21'00" LS dan 119°49'00" BT sampai 120°3'00" BT. Menurut jaraknya, letak Ibukota Kecamatan Baraka ke Ibukota Kabupaten Enrekang sekitar 36 km. Kecamatan Baraka berbatasan dengan beberapa Kecamatan di Kabupaten Enrekang dengan rincian sebagai berikut:

- ) Sebelah Utara : Kecamatan Malua dan Kecamatan Curio
- ) Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
- ) Sebelah Selatan : Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Enrekang, dan Kecamatan Bungin
- ) Sebelah Barat : Malua dan Kecamatan Enrekang

**Tabel 1.2 Luas, Jarak, dan Klasifikasi Desa/Kelurahan di Kecamatan Baraka Tahun 2012**

Desa/Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jarak (Km)		Klasifikasi Desa/Kelurahan
		Dari Ibukota Kecamatan	Dari Ibukota Kabupaten	
Baraka	22,740	6	42	Swakarya
Tomenawa	7,520	0,4	37	Swadaya
Balla	2,440	3	33	Swakarya
Kadingeh	12,130	13	49	Swadaya
Janggurara	11,370	11	47	Swadaya
Banti	7,360	7	45	Swakarya
Perangian	3,710	11	41	Swadaya
Parinding	6,390	6	43	Swakarya
Bontongan	2,840	0,2	36	Swakarya
Papendungan	19,155	15	52	Swadaya
Kendenan	18,820	12	48	Swadaya
Salukanan	17,160	7	43	Swakarya
Tirowali	5,600	5	41	Swadaya
Pandung Batu	2,750	15	50	Swadaya
Bone-Bone	19,165	18	33	Swadaya
Jumlah	159,150			

Sumber: BPS Kecamatan Baraka Tahun 2012<sup>29</sup>

Wilayah Kecamatan Baraka berada pada kawasan dataran dengan ketinggian 500 – 1.000 mdpl. Secara umum, Kecamatan Baraka memiliki kondisi wilayah yang berbukit-bukit dengan kemiringan lereng 0 – 45%. Sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.

<sup>29</sup>Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Baraka Tahun 2012

### C. Profil Desa Bone-Bone

Desa Bone-Bone adalah perkampungan terpencil di wilayah pegunungan Lantimojong Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Bone-Bone masuk wilayah Kecamatan Baraka dengan luas wilayah desa Bone-Bone 19.16 hektar, mencakup tiga dusun yang terdiri dari dusun Bungin-Bungin, dusun Buntu Billa dan dusun Pendokesan. Letak geografis desa Bone-Bone berada di wilayah Selatan Kabupaten Enrekang. Letaknya di Kecamatan Baraka dan berjarak sekitar 18 Km dari Kecamatan Baraka, sedangkan jarak dari ibu kota Kabupaten Enrekang sekitar 59 Km dan jarak dari kota makassar sekitar 312 Km.

Untuk mencapai kampung ini, dari Kota Makassar cukup melewati Ibukota Enrekang, kemudian menuju ke Kecamatan Baraka. Dari Kecamatan Baraka menuju ke Desa Bone-Bone, perjalanan dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua dengan jarak tempuh sekitar 59 Km. Batas wilayah Desa Bone-Bone meliputi:

- ) Sebelah Utara : Desa Pepandangan
- ) Sebelah Selatan : Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu
- ) Sebelah Timur : Desa Latimojong Kecamatan Basten Kabupaten Luwu
- ) Sebelah Barat : Desa Kendenan Kecamatan Baraka<sup>30</sup>

Pola penggunaan tanah di desa Bone-Bone sebagian besar digunakan untuk perkebunan dan persawahan, sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pengalokasian tanah dalam

---

<sup>30</sup>Pemerintah Kabupaten Enrekang Kecamatan Baraka Desa Bone-Bone, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2013, h. 5



wilayah desa Bone-Bone digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung aktifitas desa yang secara garis besar dapat diklasifikasikan berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Desa Bone-Bone**

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah dan Jarak
1.	Masjid	2 Unit
2.	Kantor Desa	1 Unit
3.	Pos Kamling	3 Unit
4.	Poskesdes	1 Unit
5.	Sanggar Tani	3 Unit
6.	Akses Jalan ke Kabupaten	59 Km
7.	Akses Jalan ke Kecamatan	18 Km
8.	Jalan Desa	6 Km

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) tahun 2013.<sup>31</sup>

Sarana dan prasarana yang terdapat di desa Bone-Bone sesuai dengan tabel 1.3 diatas terdiri dari infrastruktur-infrastruktur pendukung kehidupan masyarakat yaitu, adanya kantor desa yang menjadi tempat bagi masyarakat untuk menyalurkan keluhan atau aspirasi ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya yang disampaikan kepada pemerintah desa. Pos Kamling selain sebagai tempat pengamanan, dimanfaatkan pula sebagai tempat pelayanan posyandu balita, juga

<sup>31</sup>Pemerintah Kabupaten Enrekang Kecamatan Baraka Desa Bone-Bone, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2013, h. 9

tempat musyawarah warga. Sanggar tani dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat musyawarah mengenai masalah pertanian, jadwal panen dan sebagainya.

Selain itu, sarana pendukung lainnya adalah pembuatan jalan dari kabupaten dan kecamatan yang masing-masing berjarak 59 Km dari arah ibu kota kabupaten Enrekang dan 18 Km dari ibu kota kecamatan Baraka. Sedangkan untuk jalan desa yang berjarak 6 km, terdiri dari jalan tani dan jalan umum. Jalan tani di desa Bone-bone biasanya digunakan untuk aktifitas-aktifitas pertanian yaitu untuk mengangkut hasil pertanian dari ladang milik warga ke rumah.

#### **D. Aspek Demografi Desa Bone-Bone**

Uraian data aspek demografi di Desa Bone-Bone akan dijabarkan beberapa variabel meliputi jumlah penduduk di setiap dusun, jumlah penduduk berdasarkan profesi/mata pencaharian, tingkat pendidikan masyarakat, wajib belajar 9 tahun, dan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur. Jumlah penduduk Desa Bone-Bone pada tahun 2013 tercatat sebanyak 815 jiwa. Dengan perbandingan 441 jiwa untuk penduduk laki-laki dan sebanyak 374 jiwa untuk penduduk perempuan dan terdiri dari 135 kepala keluarga, yang tersebar dalam 3 (tiga) dusun sebagaimana dalam tabel berikut;

**Tabel 1.4 Jumlah Penduduk di Setiap Dusun**

No.	Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Buntu Billa	316
2	Bungin-Bungin	309
3	Pendokesan	190
<b>Desa Bone-Bone</b>		<b>815</b>

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) tahun 2013<sup>32</sup>

<sup>32</sup>Pemerintah Kabupaten Enrekang Kecamatan Baraka Desa Bone-Bone, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2013, h. 5

Di antara ketiga dusun yang ada di desa Bone-bone, dusun Buntu Billa merupakan dusun yang paling banyak penduduknya, yakni sekitar 316 jiwa dari 815 jiwa jumlah keseluruhan penduduk desa Bone-bone. Kemudian dusun Bungin-Bungin dihuni oleh 309 jiwa dan dusun Pendokesan yang dihuni oleh 190 jiwa.

Taraf pendidikan di desa Bone-Bone dapat diketahui dengan mengacu pada komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Adapun penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di desa Bone-Bone dibedakan atas penduduk yang belum sekolah, sedang TK, tidak pernah sekolah, sedang sekolah, tidak tamat SD, tamat SD/ sederajat, tamat SMP/ sederajat, tamat SMA/ sederajat, tamat D1, tamat D2, tamat D3, tamat S1. Penduduk dengan kategori sedang sekolah memiliki jumlah penduduk terbesar dengan jumlah 181 jiwa dari total jumlah penduduk yang terdata. Sedangkan penduduk yang tamat D2 merupakan penduduk dengan jumlah terendah yang memiliki jumlah 1 jiwa.

**Tabel 1.5 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Bone-Bone**

No.	Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Buta Huruf	4
2	Sedang TK	18
3	Sedang Sekolah	181
4	Tidak Sekolah	47
5	Tidak Tamat SD/Sederajat	11
6	Tamat SD	114
7	Tamat SMP	109
8	Tamat SMA	79
9	D1	-
10	D2	1
11	D3	6
12	S1	15
<b>Jumlah</b>		<b>585</b>

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) tahun 2013.<sup>33</sup>

Tabel tentang tingkat pendidikan di atas, menunjukkan bahwa masyarakat desa Bone-Bone sangat menghargai dan mengutamakan pendidikan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya penduduk desa Bone-Bone yang masih mengenyam pendidikan dari Taman Kanak-Kanak sampai sarjana. Hal ini sesuai dengan pengamatan penulis di desa Bone-Bone yang sama sekali tidak menemukan anak-anak usia remaja atau pelajar mulai dari SMP sampai Mahasiswa di desa Bone-Bone.

Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat desa Bone-Bone usia remaja yang ke daerah-daerah tertentu mulai dari kabupaten lain sampai ke luar Provinsi Sulawesi-Selatan seperti Jakarta dan lain sebagainya untuk menuntut ilmu. Selain tabel 1.3 di atas adapula tingkat pendidikan wajib belajar 9 tahun yang terdapat di tiga dusun. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 1.6 sebagai berikut.

**Tabel 1.6 Wajib Belajar 9 Tahun**

No.	Kelompok Umur	Dusun		
		Pendokesan	Buntu Billa	Bungin-Bungin
1	Usia 7-15 tahun	58 jiwa	98 jiwa	72 jiwa
2	Masih Sekolah Usia 7-15 tahun	52 jiwa	62 jiwa	67 jiwa
3	Tidak Sekolah Usia 7-15 tahun	6 jiwa	36 jiwa	5 jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>116 jiwa</b>	<b>196 jiwa</b>	<b>144 jiwa</b>

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) tahun 2013.<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Pemerintah Kabupaten Enrekang Kecamatan Baraka Desa Bone-Bone, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2013, h. 6

<sup>34</sup>Pemerintah Kabupaten Enrekang Kecamatan Baraka Desa Bone-Bone, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2013, h. 7

Perencanaan suatu wilayah juga tidak terlepas dari pertimbangan usia produktif penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Penduduk dengan jumlah terbesar yakni pada penduduk dengan rentang usia 7-12 tahun yang memiliki jumlah 112 jiwa dari total jumlah penduduk desa Bone-Bone secara keseluruhan. Sedangkan jumlah terendah yakni pada penduduk rentang usia di atas 75 tahun dengan jumlah 9 jiwa.

Berdasarkan kategori dari aspek usia produktif dan non produktif dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dengan usia non produktif di desa Bone-Bone lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang berusia produktif. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di desa Bone-Bone pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 1.7 berikut:

**Tabel 1.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

N o.	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumla h
		Laki- Laki	Perem puan	
1	0-12 Bulan	15	14	29
2	13 Bulan-4 Tahun	45	40	85
3	5-6 Tahun	38	26	64
4	7-12 Tahun	62	50	112
5	13-15 Tahun	25	39	64
6	16-18 tahun	33	32	65
7	19-25 Tahun	47	37	84
8	26-35 Tahun	60	40	100
9	36-45 Tahun	39	36	75
10	46-50 tahun	22	24	46
11	51-60 Tahun	23	19	42
12	61-75 tahun	27	13	40
13	75+	5	4	9
<b>Jumlah</b>		<b>441</b>	<b>374</b>	<b>815</b>

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) tahun 2013.<sup>35</sup>

<sup>35</sup>Pemerintah Kabupaten Enrekang Kecamatan Baraka Desa Bone-Bone, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2013, h. 8

Mata pencaharian penduduk merupakan konteks dari kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah. Penduduk di desa Bone-Bone memiliki mata pencaharian yang beragam meliputi petani, pedagang, PNS, sopir, tukang kayu, tukang batu, dan guru swasta. Bertani (petani) merupakan mata pencaharian dengan jumlah penduduk terbesar dengan jumlah 1.625 jiwa sedangkan mata pencaharian dengan jumlah penduduk terendah yakni penduduk yang berprofesi sebagai sopir. Hal ini sesuai dengan tabel mata pencaharian di desa Bone-Bone yang telah ditemukan oleh penulis sebagai berikut;

**Tabel 1.8 Mata Pencaharian**

No.	Dusun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Petani	461
2	Pedagang	4
3	PNS	5
4	Sopir	2
5	Tukang Kayu	3
6	Tukang Batu	3
7	Guru Swasta	5
<b>Jumlah</b>		<b>483</b>

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) tahun 2013.<sup>36</sup>

Berdasarkan hal ini, dapat dijelaskan bahwa hampir sebagian besar pekerjaan penduduk di desa Bone-bone ini adalah petani, dimana hasil alam terbanyak adalah kopi, padi dan nilam. Perlu kita ketahui bahwa hasil pertanian dari desa Bone-bone merupakan produk-produk yang memiliki potensi usaha yang cukup menjanjikan, misalnya saja kopi yang dihasilkan oleh para petani desa Bone-bone

---

<sup>36</sup>Pemerintah Kabupaten Enrekang Kecamatan Baraka Desa Bone-Bone, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2013, h. 6

terkenal dengan rasa dan aromanya yang khas dan berhasil meraih peringkat pertama pada tahun 2008 dalam kontes kualitas kopi terbaik se-Indonesia.<sup>37</sup>

Selain itu, padi yang ditanam oleh petani desa Bone-bone memiliki kekhasan tersendiri yang tidak ditemukan di daerah lain, hal ini karena aroma yang dihasilkan dari padi tersebut memiliki keharuman yang luar biasa dan padi tersebut hanya dapat ditemukan di desa Bone-Bone, beras yang dihasilkan dari tanaman padi di desa Bone-Bone ini dinamakan “Pulu’ Mandoti”.

#### **E. Struktur Pemerintahan Desa Bone-Bone**

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>38</sup>

Sedangkan pengertian desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

---

<sup>37</sup>Idris, *Bone-Bone: Desa di Atas Awan*, Kepala Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Enrekang, 2009.

<sup>38</sup>Kartasapoetra, *Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 41

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>39</sup>

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka diperlukan perangkat-perangkat tertentu yang bertugas untuk melaksanakan wewenang yang telah ditetapkan. Untuk itu dibentuklah pemerintah desa yang akan melaksanakan tugas dari pemerintahan desa. Pemerintah Desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa, pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para aparaturnya atau yang biasa disebut dengan Perangkat Desa yang bertugas mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sementara itu, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasal 25 Pemerintah Desa.



rancangan peraturan desa dan menetapkan sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.<sup>40</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas dan wewenang desa, pemerintah desa Bone-Bone membentuk struktur pemerintahan yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi tertentu dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa yang menjadi pemegang pemerintahan di desa yang kemudian dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekertaris desa, bendahara desa, kepala urusan dan kepala dusun. Selain kepala desa dan perangkat desa, struktur pemerintah desa juga terdiri dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.



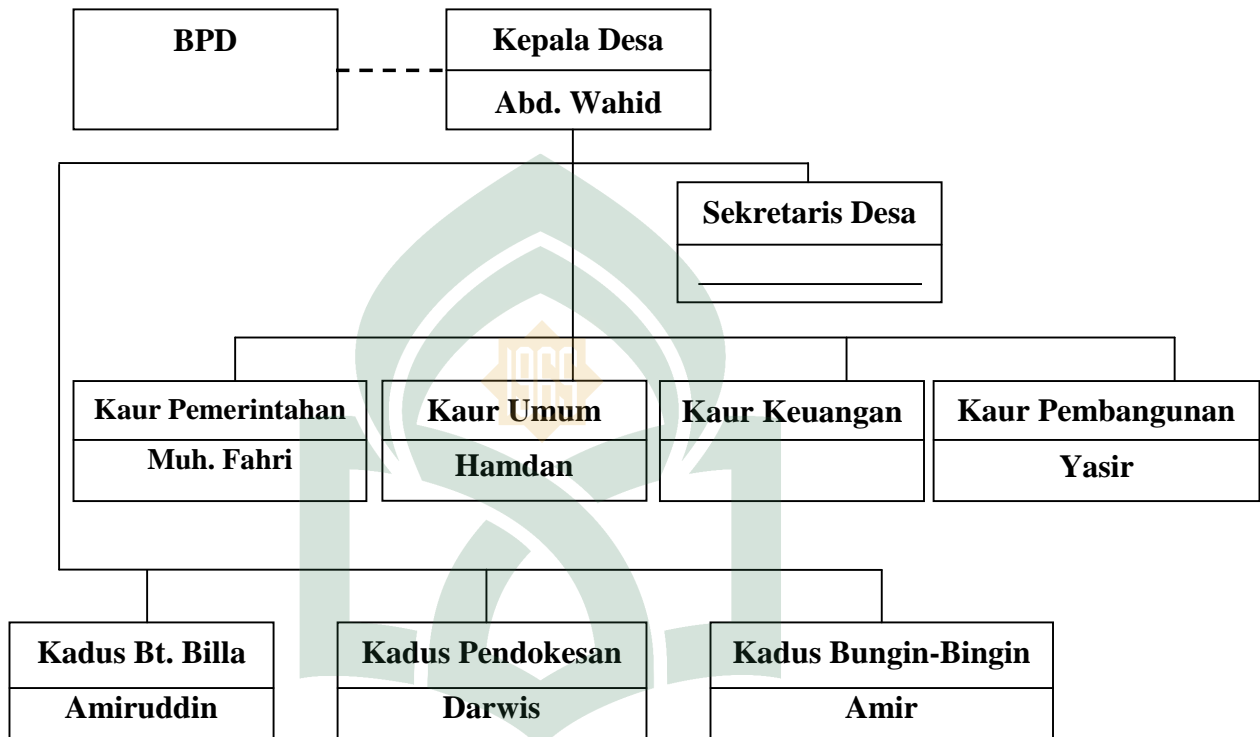
---

3.<sup>40</sup> Widjaja, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003), h.

Adapun struktur pemerintah desa Bone-Bone adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Bagan Struktur Organisasi Desa Bone-Bone**



Sumber: Kantor Desa Bone-Bone.

Terbentuknya komponen penyelenggara pemerintahan desa Bone-Bone sesuai dengan struktur tersebut, maka diharapkan agar setiap komponen pemerintahan dapat berkerja maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing agar tercipta suatu kerjasama yang baik untuk membangun desa Bone-Bone.

Oleh karena itu, dalam melakukan tugas dan fungsi dengan sebaaik-baiknya, maka pemerintah desa Bone-Bone membentuk visi dan misi desa yang kemudian menjadi acuan atau pedoman dalam membangun dan memajukan desa Bone-Bone, visi dan misi desa Bone-Bone ialah;

1. Visi : “Menjadikan Desa Bone-Bone sebagai Desa Sehat”
2. Misi :
  - a. Mendorong peningkatan layanan masyarakat melalui kelembagaan desa.
  - b. Mendorong peningkatan kualitas sarana dan prasarana umum desa.
  - c. Mendorong peningkatan mutu kesehatan masyarakat.
  - d. Perlunya peningkatan sumber daya manusia.
  - e. Mendorong adanya jaminan harga pertanian.<sup>41</sup>

Penyeleggaran pemerintahan di desa Bone-Bone selalu mengacu pada visi dan misi desa Bone-Bone yang pada intinya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembagian kerja antara seluruh komponen pemerintah desa harus mengacu pada visi dan misi desa serta perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, dalam melaksanakan tugas yang telah ditetapkan, kepala desa juga memiliki wewenang tersendiri yaitu, dalam melaksanakan tugasnya kepala desa berwenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal, kepala desa juga berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.

Bukan hanya itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa wewenang dari kepala desa selain yang telah

---

<sup>41</sup> Pemerintah Kabupaten Enrekang Kecamatan Baraka Desa Bone-Bone Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2013, h. 11-12

disebutkan diatas adalah membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif, menjadi perwakilan desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan aturan perundang-undangan serta melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seorang kepala desa melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepala desa berhak untuk mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa, menerima penghasilan tetap setiap bulan baik berupa tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan, selain itu kepala desa juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya juga harus mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan. Adapun kewajiban dari kepala desa adalah memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Selain itu, kewajiban seorang kepala desa juga harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mentaati dan menegakkan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan berdemokrasi, serta melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.<sup>42</sup>

Selain kepala desa, perangkat desa juga memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati atau walikota.

Menjadi perangkat desa harus sesuai dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 pasal 50 tentang Desa bahwa, perangkat desa harus berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun, terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran dan syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

---

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 ayat 4 tentang kewajiban kepala desa.

Selain kepala desa dan perangkat desa, pihak lain dalam struktur pemerintahan desa yang memiliki wewenang dan tugas tertentu adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan badan permusyawaratan desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara berturut-turut. Serta petugas kesehatan yang bertugas melayani dan memantau kondisi kesehatan masyarakat desa.<sup>43</sup>

#### **F. Kondisi Sosial Budaya Desa Bone-Bone**

Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat desa Bone-Bone memiliki kekhasan seperti halnya masyarakat kabupaten Enrekang pada umumnya. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') yang berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa.

Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin.

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasal 55

Desa Bone-bone yang terletak di kecamatan Baraka dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Duri sebagai alat untuk berkomunikasi antara sesama masyarakat. Ditinjau dari kultur sosial dan budayanya, masyarakat di desa Bone-Bone memiliki rasa sosial dan kekeluargaan yang tinggi dengan pemahaman agama islam yang kental bagi masyarakatnya, hal ini terlihat pada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan misalnya hal yang lain sederhana seperti shalat berjamaah. Shalat berjamaah menjadi cermin utama dalam menilai keadaan sosial dan kebudayaan masyarakat desa Bone-bone hal ini dikarenakan shalat berjamaah menjadi ajang dimana masyarakat desa Bone-Bone memulai dan mengakhiri segala aktifitas sehari-hari.

Jika kita melihat kondisi masyarakat semacam ini, dimana shalat berjamaah yang sebagian orang menganggapnya hanya kebebasan untuk dilaksanakan namun tidak demikian bagi masyarakat di desa Bone-Bone yang secara nyata dan sadar menganggap shalat berjamaah sebagai kegiatan yang bukan hanya perintah yang wajib dilaksanakan tetapi juga sebagai cerminan dari sikap dan perilaku keseharian dari masyarakat desa Bone-Bone.

Kebersamaan dan rasa persaudaraan masyarakat desa Bone-Bone tidak hanya dalam hal beragama atau shalat berjamaah semata, lebih dari itu sifat kekeluargaan dan rasa saling tolong menolong juga diperlihatkan oleh masyarakat desa Bone-Bone disetiap kegiatan-kegiatan lainnya seperti khitanan, pernikahan atau kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong dan lain sebagainya yang semuanya dihadiri oleh seluruh masyarakat desa Bone-Bone.

### **BAB III**

#### **Hasil dan Pembahasan**

##### **A. Implementasi Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok oleh Pemerintah terhadap Masyarakat di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang**

Sesuai teori yang dikemukakan oleh William N. Dunn mengenai tahapan implementasi kebijakan, jika dikaitkan dengan proses pelaksanaan peraturan desa Bone-Bone dapat dijelaskan bahwa, Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok yang ditetapkan di Desa Bone-Bone pada 11 September 2009 memang telah dilaksanakan secara resmi sejak tahun 2009, namun demikian pelaksanaan kebijakan ini masih dianggap kurang efektif dalam memberikan pemahaman bagi masyarakat.

Barulah pada tahun 2011 masyarakat mulai memahami dan secara perlahan mulai mentaati aturan tersebut. Hal ini dikarenakan kurang jelasnya informasi yang diberikan oleh para pelaksana kebijakan mengenai isi kebijakan tersebut dan kurang dilibatkannya masyarakat secara menyeluruh dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Adapun pola penerapan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu melalui sosialisasi. Sosialisasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menarik dan memperkenalkan pihak atau objek yang diajak, agar pihak atau objek tersebut dapat mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dan dianut oleh masyarakat. Tujuan pokok adanya sosialisasi bukan semata-mata agar kaidah-kaidah dan nilai-nilai diketahui serta dimengerti. Tujuan akhir adalah agar



manusia bersikap dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku serta agar yang bersangkutan dapat menghargainya.<sup>42</sup>

Sosialisasi kebijakan dilaksanakan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan dan sasaran kebijakan, tetapi yang lebih penting mereka akan dapat menerima, mendukung, dan bahkan mengamankan pelaksanaan kebijakan tersebut.<sup>43</sup>

Perlu dilaksanakan usaha-usaha penyadaran kepada seluruh komponen masyarakat baik masyarakat lokal maupun para pemangku kepentingan lainnya, untuk membuat masyarakat menerima, memahami dan mendukung suatu kebijakan yang telah dibuat. Sistem sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Bone-Bone untuk melaksanakan usaha-usaha penyadaran kepada masyarakat melalui berbagai teknik sosialisasi yaitu melalui sosialisasi langsung maupun sosialisasi tidak langsung.

### **1. Sosialisasi Langsung**

Sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah desa Bone-Bone dalam mensosialisasikan peraturan desa Bone-Bone khususnya peraturan desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok adalah dengan melalui dialog atau diskusi dengan seluruh komponen masyarakat terkait dampak yang disebabkan oleh rokok terhadap berbagai aspek kehidupan, baik kesehatan, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya.

Metode yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Bone-Bone dalam sosialisasi langsung kepada masyarakat, dilakukan dengan berbagai cara salah satunya

<sup>42</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, h. 493.

<sup>43</sup> Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputido, 2003), h. 90-91.

adalah dengan tatap muka secara langsung (diskusi) yang dilakukan oleh pemerintah desa Bone-Bone dengan tokoh-tokoh masyarakat desa Bone-Bone. Dalam proses diskusi yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat, dilakukan di setiap ada kesempatan, hal ini berdasarkan pemaparan dari Bapak Abd. Wahid, sebagaimana dalam wawancara berikut:

Kapan saja dan dimana saja kita selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa menggunakan rokok itu berbahaya baik pada saat gotong royong, acara pernikahan, pengajian, dan lain sebagainya. Kita selalu berusaha untuk membangun pemahaman masyarakat tentang bahaya yang diakibatkan oleh rokok.<sup>44</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa peraturan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Bone-Bone dalam mensosialisasikan atau membangun pemahaman masyarakat tentang bahaya rokok bagi kehidupan tidak harus dilakukan dalam forum-forum formal, akan tetapi hal itu dapat juga dilakukan dalam forum-forum non formal.

Hal ini sebenarnya memberikan dampak bagi tingkat pemahaman masyarakat terkait dampak yang diakibatkan rokok dan mengonsumsi makanan yang mengandung zat pewarna sintetis dan bahan kimia berbahaya, dikarenakan proses komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa dilakukan pada waktu masyarakat bisa mendengar atau menyimak penjelasan dari pemerintah desa dibanding dalam forum-forum yang biasanya dianggap kaku dan ribet.

Selain itu, kegiatan gotong royong atau pernikahan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya selalu dihadiri oleh seluruh masyarakat sehingga penyampaian materi tentang dampak rokok dapat didengar oleh masyarakat

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Abd. Wahid, Kepala Desa Bone-Bone. Di Desa Bone-Bone, pada tanggal, 14 februari 2015.

dibandingkan pada forum-forum tertentu yang kebanyakan masyarakat tidak dapat hadir karena alasan-alasan tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi langsung mengenai kebijakan bebas asap rokok yang dilakukan oleh pemerintah desa dilakukan dengan tatap muka seperti diskusi, rapat, penyuluhan, pengajian bersama dengan masyarakat desa.

Proses diskusi dilakukan pada setiap ada kesempatan seperti pada waktu kerja bakti, gotong royong, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa paham dengan kebijakan yang disampaikan karena dilakukan dengan santai dan dalam keadaan yang tidak kaku atau formal, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat.

## **2. Sosialisasi Tidak Langsung**

Sosialisasi tidak langsung dapat dilakukan dengan berbagai cara atau metode, baik melalui media cetak seperti poster, stiker, brosur atau melalui media lainnya. Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan proses sosialisasi tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah desa Bone-Bone dalam mensosialisasikan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah dengan melalui media cetak berupa poster, brosur, stiker dan lain sebagainya yang dibuat oleh pemerintah desa dan disebar di seluruh pelosok desa Bone-Bone.

Kegiatan sosialisasi melalui media cetak berupa poster merupakan salah satu media untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat dengan gambar dan menggunakan kata-kata yang singkat, jelas, serta mudah dimengerti, gambar yang ditampilkan menggunakan warna-warna yang mencolok dan menarik perhatian,

walaupun hal tersebut terkesan sederhana namun maksud yang ingin disampaikan sangat jelas.

Seperti mencantumkan gambar tentang penyakit atau bahaya yang disebabkan ketika kita mengkonsumsi rokok, kemudian dilengkapi dengan kata-kata singkat yang bersifat menyindir atau menyadarkan masyarakat tentang bahaya rokok. Poster dicetak kemudian ditempelkan pada tempat-tempat yang sering dilalui orang atau yang sering digunakan sebagai tempat orang berkumpul, misalnya balai desa, tempat ibadah, pos ronda dan tempat lainnya.

Namun demikian, proses sosialisasi tidak langsung dengan menggunakan poster ini kurang ditanggapi oleh masyarakat, apalagi masyarakat desa Bone-Bone yang mayoritas bekerja sebagai petani kebanyakan aktifitasnya dilakukan di ladang sehingga mereka tidak bereaksi dengan penempelan poster tersebut. Selain poster, brosur juga menjadi sarana sosialisasi lain yang cukup membantu.

Brosur dibuat dengan gaya bahasa yang sederhana, singkat dengan desain yang menarik dengan disertai dengan gambar-gambar dan foto serta berisikan informasi praktis tentang bahaya rokok bagi kesehatan diri sendiri maupun orang lain serta dampak yang dihasilkan bagi perokok baik dampak secara ekonomi, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pembuat brosur yang dibagikan kepada masyarakat, berikut adalah wawancara dengan bapak Hamdan selaku kepala urusan umum desa Bone-Bone yang menangani masalah-masalah seputar keadaan sosial dan kemasyarakatan sebagaimana dalam wawancara berikut:

Untuk masalah sosialisasi melalui media cetak yang salah satunya dengan iklan poster atau brosur, kita lakukan dengan membuat poster peringatan

tentang bahaya rokok bagi kesehatan baik untuk si pelaku dan juga untuk orang lain. Poster ini kita tempel di tempat-tempat yang di mana masyarakat dapat membacanya seperti di masjid, kantor desa, sekolah, atau juga di pos ronda. Sedangkan untuk brosur, kita dapatkan dari pemerintah Kabupaten Enrekang melalui Dinas Kesehatan yang membuat poster tersebut. Poster-poster tersebut kemudian kita bagikan ke seluruh masyarakat pada waktu sehabis shalat jum'at sehingga dapat dipastikan bahwa seluruh warga mendapatkan. Selain poster dan brosur, kita juga membuat stiker yang berisikan peringatan bahaya rokok dan pesan-pesan tentang larangan merokok yang ditempelkan di setiap rumah yang ada di desa Bone-Bone.<sup>45</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipaparkan bahwa pemerintah desa Bone-Bone belum membuat iklan poster atau brosur mengenai kebijakan larangan memasukkan dan mengonsumsi makanan atau bahan makanan yang mengandung zat pewarna sintetik dan bahan kimia berbahaya lainnya. Akan tetapi, pemerintah desa Bone-Bone telah melakukan berbagai cara untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait aturan tentang kawasan bebas asap rokok.

Selain sosialisasi melalui poster, stiker ataupun brosur, pemerintah desa Bone-bone juga melakukan sosialisasi tentang bahaya rokok dengan menggunakan media papan peringatan dan spanduk. Beberapa papan peringatan berisikan tentang peringatan untuk tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan, misalnya “Anda Memasuki Kawasan Bebas Asap Rokok” dan lain sebagainya. Papan peringatan yang ada di desa Bone-Bone dipasang di berbagai tempat, misalnya di pintu gerbang sebelum masuk di desa Bone-Bone, di pusat desa Bone-Bone, di depan kantor desa dan lain sebagainya.

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Hamdan, kepala urusan umum pemerintah desa Bone-Bone. Di Desa Bone-Bone pada tanggal, 14 Februari 2015.

Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan sosialisasi tidak langsung tentang kebijakan kawasan bebas asap rokok kepada masyarakat dilakukan dengan melalui beberapa media tertentu, seperti poster, spanduk, papan pengumuman, dan lain sebagainya. Isi dari poster atau media lainnya mengajak masyarakat untuk selalu mentaati aturan tentang kebijakan kawasan bebas asap rokok. Selain mengajak dan mengingatkan masyarakat, media sosialisasi tidak langsung ini juga digunakan untuk memberikan informasi atau memberitahukan kepada masyarakat daerah lain atau tamu yang datang ke desa Bone-Bone bahwa ada kebijakan berupa peraturan desa yang melarang untuk merokok di kawasan desa Bone-Bone.

Pelaksanaan sosialisasi peraturan desa Bone-Bone tentang kawasan bebas asap rokok yang dilakukan oleh pemerintah desa Bone-Bone, baik secara langsung maupun tidak langsung pada dasarnya bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh masyarakat desa tentang bahaya atau dampak yang akan dihasilkan oleh rokok baik untuk individu/pelaku dan dampak bagi orang lain, dampak yang dihasilkan bukan sekedar mengganggu kesehatan tetapi juga berdampak dalam segi ekonomi, pendidikan dan agama. Selain itu, sosialisasi kebijakan dilaksanakan agar masyarakat dapat setuju dengan aturan yang akan diterapkan sehingga pelaksanaan aturan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Seharusnya dengan diterapkannya kebijakan kawasan bebas asap rokok, dapat diharapkan meningkatnya kesadaran masyarakat perokok untuk tidak merokok di area desa Bone-Bone, terutama di tempat-tempat tersembunyi dan sunyi.

Namun pada kenyataannya tidak demikian. Tidak tampak peningkatan kesadaran masyarakat perokok. Mereka masih biasa merokok di tempat-tempat tersembunyi. Razia pengawasan semakin jarang dilakukan. Adapun fakta yang terjadi di lapangan, ada sebagian masyarakat yang melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi ada juga yang belum melaksanakan sepenuhnya sesuai dengan penjelasan di atas.

### **B. Dampak Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok Terhadap Masyarakat di Desa Bone-Bone**

Bangsa Indonesia tergolong penggemar rokok. Merokok merupakan kebiasaan yang telah menjadi bagian dari rutinitas bahkan menjadi budaya dalam masyarakat. Kebiasaan merokok adalah kebiasaan buruk nenek moyang kita yang tetap kita lestarikan sampai hari ini. Kebiasaan tersebut bersinggungan langsung dengan hak para perokok untuk merokok, dan hak bukan perokok untuk menghirup udara yang bersih dan sehat. Banyak perokok di Indonesia yang sudah menyadari akan bahaya merokok. Namun, kesadaran bahaya merokok tidak lantas membuat mereka berhenti untuk merokok.

Para perokok biasanya tidak mau disebut pecandu, ketagihan, atau ketergantungan. Pecandu rokok merasakan kenikmatan rokok karena adanya nikotin. Nikotin adalah psikotropika stimulan yang mendatangkan perasaan tenang, segar dan fit. Perokok jadi berfikir jernih, hilang rasa lapar, hilang rasa kantuk, dan menjadi bersemangat untuk bekerja.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008) h. 58

Bagi pecandu rokok, nikotin dalam rokok itulah yang dapat membuat hidup menjadi lebih hidup. Hidup menjadi nikmat. Sayangnya, nikotin menyebabkan ketagihan dan kecanduan. Rokok tergolong narkoba golongan kedua (psikotropika) atau golongan ketiga (bahan adiktif lainnya). Dengan demikian, merokok sama dengan mengkonsumsi narkoba. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), narkoba itu haram. Jadi, rokok seharusnya juga dianggap haram.<sup>47</sup> Selain itu, rokok dianggap sangat berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan dan agama. Adapun ayat Al-Qur'an yang digunakan dalam fatwa tentang Hukum Merokok, yaitu:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا  
 إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahannya:

“26) Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 27) Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”<sup>48</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa masyarakat di Desa Bone-Bone terutama masyarakat menengah ke bawah banyak yang perokok. Secara tidak langsung mereka telah membuang-buang uang yang seharusnya bisa dipergunakan untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat, tapi kenyataannya dipergunakan untuk membeli rokok.

<sup>47</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, h. 59

<sup>48</sup> Departemen Agama Republik Indonesia: *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 17



Upaya untuk menyadarkan para pecandu rokok untuk meninggalkan rokok memang tidak mudah. Banyak hal yang telah dilakukan, mulai dari kampanye bahaya rokok bagi kesehatan hingga penerapan tentang pencantuman peringatan tertulis bahayanya di kemasan, bahkan yang terkini dan menjadi bahan perbincangan saat ini yaitu tertera gambar bahaya atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok yang sangat mengerikan pada kemasan rokok. Akan tetapi gambar mengerikan tersebut tidak terlalu dihiraukan oleh para pecandu rokok.

Sejauh ini, pemerintah memang telah mengeluarkan atau membentuk aturan atau kebijakan yang bertujuan untuk meminimalisir atau menanggulangi penyebaran rokok terutama bagi perokok pasif, namun kebijakan tersebut masih sebatas aturan yang belum bisa dirasakan dampak positifnya bagi masyarakat. Salah satu aturan yang telah dibuat oleh pemerintah tentang rokok adalah Undang-Undang Kesehatan nomor 36 pasal 115 tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok.<sup>49</sup>

Aturan tersebut menjelaskan bahwa yang termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum serta kawasan lain yang telah ditetapkan. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu bentuk pengamanan zat adiktif agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan

<sup>50</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan

Adapun beberapa dampak yang dihasilkan oleh penerapan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok, yang diterapkan di desa Bone-Bone sampai sekarang, yaitu:

### **1. Dampak Peraturan Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 terhadap Lingkungan**

Kebiasaan merokok sudah meluas di hampir semua kelompok masyarakat di Indonesia dan cenderung meningkat, terutama di kalangan anak dan remaja sebagai akibat gencarnya promosi rokok di berbagai media massa. Kondisi tersebut mempengaruhi perilaku masyarakat yang cenderung hanya memikirkan diri sendiri dan meraih keuntungan bagi dirinya tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Ditambah lagi kondisi lingkungan (kondisi untuk memperoleh kehidupan) yang memaksa mereka untuk melakukan hal tersebut, terlebih jika kondisi ini dipengaruhi oleh faktor sikap dan kebiasaan yang sangat sulit untuk diubah.

Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok telah menjadi semakin serius, mengingat merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan, di antaranya melalui penetapan kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok.

Sebelum diberlakukan peraturan desa ini, dampaknya menyebar luas ke anak-anak kecil. Banyak anak-anak di bawah umur yang merokok di wilayah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Idris dalam hasil wawancara berikut:

Saya melihat orang di kampung sebelum diterapkannya peraturan desa ini, anak-anak yang berumur 6 tahun sudah mulai merokok dan karena hal ini banyak anak yang putus sekolah dan tidak melanjutkan lagi sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi.<sup>51</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa, Bapak Idris merasa miris melihat anak-anak yang masih berusia 6 tahun keatas sudah mulai merokok, bahkan sampai putus sekolah. Karena sebelum diterapkannya peraturan desa tersebut rokok menjadi hal yang lebih diutamakan dibandingkan pendidikan atau uang sekolah bagi anak-anak, hal ini mengakibatkan ada anak yang sampai putus sekolah. Selain itu, menimbulkan dampak lain disekitar lingkungan yaitu banyak terjadi kebakaran hutan di kawasan desa Bone-Bone.

Berdasarkan hal ini, pemerintah desa Bone-Bone mengeluarkan kebijakan dalam bentuk peraturan desa yang mengatur tentang Kawasan Bebas Asap Rokok. Kawasan bebas asap rokok adalah seluruh wilayah atau area Desa Bone-Bone dinyatakan bebas dari kegiatan atau aktifitas merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan atau mempromosikan rokok.<sup>52</sup> Adanya peraturan kebijakan yang mengatur tentang rokok di desa Bone-Bone menjadi hal yang baru dalam proses pelaksanaan kebijakan pada tingkat desa.

Peraturan Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Bone-Bone yang melarang masyarakat desa Bone-Bone dan masyarakat dari daerah lain untuk merokok, menjual, dan mengiklankan produk rokok/tembakau di desa Bone-Bone. Latar belakang terbentuknya aturan ini didasari atas kekhawatiran dari

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Pak Idris mantan Kepala Desa Bone-Bone, via telepon pada tanggal 20 Februari 2015.

<sup>52</sup> Peraturan Desa Bone-Bone Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok. Bab I Pasal 1, h. 3

para tokoh masyarakat dengan kondisi masyarakat desa Bone-Bone yang sudah sangat terbiasa dengan rokok, dimana rokok bukan hanya dinikmati oleh orang dewasa saja tapi juga di konsumsi oleh anak-anak yang masih berusia 6-12 tahun.

Peraturan desa Bone-bone nomor 1 tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok memberlakukan larangan kepada masyarakat desa Bone-Bone untuk tidak merokok di seluruh kawasan desa Bone-Bone. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Desa Bone-Bone No.1 Tahun 2009 Bab V Pasal 8 yang berbunyi, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan atau aktifitas merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan rokok di wilayah desa Bone-Bone.<sup>53</sup>

Hal tersebut lebih lanjut dijelaskan oleh Bapak Abd. Wahid, sebagaimana dalam wawancara berikut:

Larangan ini bukan hanya berlaku bagi masyarakat atau penduduk desa Bone-Bone saja tetapi juga bagi masyarakat desa atau pengunjung (tamu) yang berasal dari daerah lain yang memasuki kawasan desa Bone-Bone. Ruang lingkup yang menjadi area larangan merokok di desa Bone-Bone mencakup seluruh kawasan desa Bone-bone tanpa terkecuali. Baik di ladang atau perkebunan milik masyarakat, hutan, atau di rumah-rumah penduduk. Aktivitas merokok baru bisa dilakukan di luar kawasan desa Bone-Bone yaitu, di luar perbatasan desa dan didalam kawasan desa-desa sekitar yang berbatasan dengan desa Bone-Bone.<sup>54</sup>

Pembentukan peraturan desa tentang larangan mengkonsumsi rokok di dalam kawasan desa Bone-Bone ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya asap rokok bagi seluruh warga desa Bone-Bone, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat desa

---

<sup>53</sup> Peraturan Desa Bone-Bone Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok. Bab V Pasal 8, h. 5

<sup>54</sup> Wawancara dengan Abd. Wahid, Kepala Desa Bone-Bone di kantor desa pada tanggal 14 Februari 2015.

Bone-Bone, melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung serta menciptakan dan mewajibkan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok bagi generasi selanjutnya.<sup>55</sup>

## **2. Dampak Peraturan Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 bagi Kesehatan**

Banyak perokok yang sesungguhnya telah mengetahui akibat buruk rokok bagi dirinya sendiri, tetapi tetap merokok. Berarti ia memang kecanduan sehingga berani menanggung akibatnya, yaitu mati muda sia-sia. Asap rokok tidak hanya berbahaya bagi perokok namun juga berbahaya bagi orang yang berada di sekitarnya. Namun, jarang perokok yang tahu bahwa kebiasaan merokoknya dapat menyengsarakan istri, anak, dan orang-orang di sekitarnya karena telah menjadi perokok pasif.

Wanita dan anak-anak merupakan anggota keluarga yang paling sering terpapar oleh asap rokok, yang terutama berasal dari pasangan atau orangtuanya. Anak-anak dari orangtua yang merokok beresiko terkontaminasi terutama dari debu rumah dan permukaan perabotan dalam rumah termasuk pada lantai, karpet, selimut, dan peralatan lain bahkan dari sidik jari para perokok, yang merupakan penghirup asap rokok baik dalam bentuk gas maupun partikel yang masih tersimpan berbulan-bulan meskipun orangtua atau pasangan telah berhenti merokok.

Anak yang belum memasuki usia sekolah akan lebih banyak berada di dalam rumah sehingga kemungkinan untuk terkontaminasi akan jauh lebih besar

---

<sup>55</sup> Peraturan Desa Bone-Bone Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok. Bab II Pasal 3, h. 3-4

dibandingkan jika ia berada di udara bebas. Mereka ikut terkena racun karena menghisap asap rokok dan menghisap udara pernapasan kotor dan bau dari si perokok.

Menurut penelitian di Jepang, 90% wanita yang terkena kanker payudara dan kanker rahim adalah istri perokok. Suaminya yang merokok, tetapi dirinya yang terkena dampak negatif dari paparan asap rokok dari suaminya. Oleh karena itu, suami harus tahu bahwa kanker adalah risiko yang dialami oleh 90% istri bersuami perokok. Karena itu, para ibu harus dengan bijaksana dan penuh kasih sayang membujuk suaminya untuk berhenti merokok.<sup>56</sup>

Adapun, menurut penelitian di Amerika Serikat, 86% anak yang kecerdasannya rendah adalah anak yang orang tuanya merokok. Itulah nasib anak yang orang tuanya perokok. Masa depannya terancam suram. Anak-anak yang orang tuanya merokok hendaknya dengan santun memohon agar orang tuanya berhenti merokok. Orang tua yang menginginkan keturunan cerdas dan pandai harus berhenti merokok sekarang juga. Sukses masa depan anak ditentukan oleh sikap orang tua hari ini.<sup>57</sup>

Dampak negatif dari konsumsi rokok yang meluas di masyarakat adalah tingkat kesehatan yang rendah, angka kematian yang tinggi, tingkat kecerdasan yang rendah, tingkat cacat tubuh bawaan yang tinggi, dan kemiskinan yang merata. Pemasukan yang didapat oleh negara dari cukai rokok tidak akan cukup untuk memperbaiki dampak negatif tadi.

---

<sup>56</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, h. 60

<sup>57</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, h. 61

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa asap rokok berbahaya terhadap orang-orang disekitar, terutama orang-orang terdekat perokok aktif. Rokok selain merusak diri pemakainya, juga merusak istri dan anak-anaknya. Selain itu, penderitaan yang diakibatkan oleh rokok lebih luas dan berjangka panjang. Kerugiannya pun lebih banyak. Untuk skala nasional, biaya penanggulangan dampak negatif rokok lebih besar daripada pemasukan yang diperoleh dari produksi rokok.

Di kawasan desa Bone-Bone sendiri, masyarakat mulai diserang penyakit terutama bagi kaum pria yang pada dasarnya berprofesi sebagai petani dan menjadi tulang punggung bagi keluarga namun kebanyakan dari mereka tidak bisa lagi bekerja keras karena gangguan pernapasan atau penyakit lain yang diakibatkan oleh rokok. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Tahir, berdasarkan wawancara berikut:

Sebelum masyarakat perokok berhenti merokok, untuk berangkat ke kebun yang jaraknya 1 km biasa mereka istirahat sampai beberapa kali untuk sampai ke kebunnya, tapi setelah mencoba untuk menjauhi rokok, mereka biasa tidak pernah istirahat dalam perjalanan sampai ke sana.<sup>58</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dijelaskan bahwa rokok tidak hanya mempengaruhi kondisi kesehatan saja tapi juga mempengaruhi stamina dan kinerja seseorang. Selain itu, berdasarkan pemaparan Bapak Tahir menunjukan bahwa rokok secara tidak langsung sangat mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat desa hal ini dilihat dari penghasilan atau kinerja masyarakat yang cenderung lemah atau kurang dalam bekerja ketika masih merokok, dibanding

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Tahir, Tokoh Masyarakat Desa Bone-Bone, pada tanggal 14 Februari 2015.

ketika mereka telah berhenti dan menjauhi rokok. Hal tersebut terjadi, karena rokok secara tidak langsung menyerang kesehatan dan kekuatan tubuh masyarakat sehingga semangat atau kemampuan untuk bekerja menjadi kurang. Hal serupa dipaparkan oleh Ibu Rahmatia, dalam wawancara berikut:

Dulu banyak masyarakat yang mengeluh tentang kesehatannya di Poskesdes terutama batuk-batuk akibat rokok. Tetapi setelah diterapkannya peraturan desa ini sudah jarang yang mengeluhkan kesehatannya.<sup>59</sup>

Sesuai dengan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rokok sangat berbahaya bagi seluruh aspek kehidupan bukan hanya kesehatan, tapi juga ekonomi, sosial, budaya dan bahkan pendidikan juga dipengaruhi oleh rokok, bahkan di desa Bone-Bone perilaku merokok sampai dilakukan oleh anak kecil dan remajanya.

### **3. Dampak Peraturan Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 bagi Perokok Aktif**

Harus diakui bahwa rokok memang dapat meningkatkan kreativitas bagi pecandunya. Rokok juga dapat memberikan ketenangan, mengusir perasaan malas, menghilangkan sakit kepala dan stres, karena nikotin adalah psikotropika stimulan. Timbulnya perasaan tenang, bebas stres, dan kreatif itu adalah reaksi positif dari psikotropika yang hanya berlaku bagi pecandunya. Namun, bagi yang bukan pecandu, efeknya tidak seperti itu. Merokok digambarkan oleh produsen sebagai suatu kebiasaan yang jantan, berkaitan dengan kesehatan, kebahagiaan, kebugaran, kekuatan dan kesuksesan secara seksual.

Efek “positif” itu hanyalah efek semu jangka pendek, sebab dalam jangka panjang pecandu rokok akan mengalami dampak buruk berupa ketagihan dan

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Ibu Rahmatia, Perawat Poskesdes Desa Bone-Bone via telepon pada tanggal 20 Februari 2015.



timbulnya penyakit. Resiko lainnya adalah menyebabkan kanker dan anak yang kurang cerdas. Perokok juga beranggapan bahwa merokok dapat dihentikan dengan segera sewaktu-waktu kapanpun mereka ingin, meski dalam kenyataannya, ketergantungan terhadap kandungan nikotin yang terdapat dalam sebatang rokok teramat sulit untuk dipulihkan. Perilaku merokok merupakan perilaku yang membahayakan kesehatan tetapi masih banyak orang yang melakukan kebiasaan tersebut. Meski pada kenyataannya akan menimbulkan berbagai macam penyakit, memicu terjadinya kematian dini, dan impotensi.

Pembentukan peraturan desa tentang rokok ini bertujuan untuk meminimalisir dan membantu masyarakat untuk menjauhi rokok atau berhenti merokok, karena sebenarnya banyak masyarakat yang sangat ingin berhenti merokok tapi sulit untuk melakukannya, makanya pemerintahan desa Bone-Bone membuat peraturan agar masyarakat tidak merokok di kawasan desa Bone-Bone, kalau ingin merokok harus keluar dari desa, sehingga masyarakat yang merokok akan mengurungkan niat untuk jauh-jauh keluar desa hanya untuk merokok. Selain itu, peraturan ini dibuat untuk menjauhkan masyarakat dari bahaya rokok bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda.

Namun, dari hasil wawancara peneliti, masih ada saja masyarakat yang melanggar atau tidak mematuhi peraturan desa tentang kawasan bebas asap rokok tersebut walaupun mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Amri, berdasarkan wawancara berikut:

Sebagian masyarakat dari desa Bone-Bone khususnya perokok masih biasa mencuri-curi kesempatan untuk merokok. Mereka merokok di kawasan desa seperti di kebun, dalam rumah, dan tempat tersembunyi lainnya. Mereka beranggapan bahwa para penggagas aturan ini telah merenggut hak asasi

mereka karena merokok adalah hal yang telah dilakukan secara turun temurun dan sudah menjadi sebuah kebiasaan.<sup>60</sup>

Beberapa masyarakat di desa Bone-Bone khususnya perokok keberatan dengan diberlakukannya kebijakan kawasan bebas asap rokok dikarenakan mereka menganggap bahwa merokok adalah sesuatu yang menyangkut hal pribadi yang bebas mereka lakukan. Sebagian dari masyarakat desa Bone-Bone juga tidak terlalu sependapat dengan kebijakan tersebut tetapi terpaksa mematuhi karena sudah menjadi keputusan pemerintahan desa.

Sesuai teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh William N. Dunn, pada tahap implementasi kebijakan jika dikaitkan dengan proses pelaksanaan peraturan desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok, maka dapat dijelaskan bahwa dengan diterapkannya kebijakan kawasan bebas rokok ini, seharusnya dapat diharapkan meningkatnya kesadaran masyarakat perokok untuk tidak lagi merokok di kawasan desa Bone-Bone. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Tidak tampak peningkatan kesadaran masyarakat perokok bahkan masih banyak masyarakat yang merokok sembunyi-sembunyi di tempat tersembunyi dan sepi.

Perokok sulit meninggalkan rokok karena kenikmatan yang disebabkan oleh nikotin memiliki daya adiktif. Artinya rokok itu memaksa perokok untuk ketagihan. Bila konsumsi rokok dihentikan, perokok bukannya merasa sehat, melainkan justru akan timbul rasa sakit dan tidak enak. Perokok sebenarnya ingin

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Amri, Masyarakat Desa Bone-Bone via telepon pada tanggal 1 Maret 2015.

terus merokok bukan hanya karena enak, melainkan untuk mencegah atau menghilangkan perasaan tidak enak yang timbul kalau ia berhenti merokok.

Sebagian perokok menyadari bahwa merokok tidak baik untuk kesehatan dan lingkungannya, namun mereka dengan berbagai alasan merasa sulit untuk meninggalkan kebiasaannya. Bagi sebagian besar pecandu rokok, melepas dari jeratan kecanduan rokok tidaklah mudah. Banyak orang telah berusaha berhenti merokok. Ada yang bernazar kalau bisa berhasil berhenti dari merokok. Ada yang mengulum permen untuk menggantikan rokok. Ada pula yang melakukan banyak aktivitas untuk melupakan keinginan merokok. Ada yang telah tiga sampai empat kali mencoba berhenti, tetapi belum juga berhasil.

Diberlakukannya Peraturan Desa No. 1 tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-Bone, memberikan dampak tersendiri terhadap masyarakat yang perokok. Karena dengan adanya peraturan desa tersebut mereka tidak bebas lagi untuk merokok, bahkan harus berhenti merokok. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Arifin dalam wawancara berikut:

Merokok sudah menjadi kebiasaan mi dari dulu, susah untuk dirubah atau bahkan dihilangkan. Tidak segampang membalikkan telapak tangan. Dan tidak mudah untuk langsung menerima kebijakan yang telah diterapkan ini.<sup>61</sup>

Hal serupa dikemukakan oleh Bapak Bahrin, berdasarkan wawancara berikut:

Di desa Bone-Bone masih biasa terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat perokok, menyangkut tentang peraturan kawasan bebas asap rokok tersebut. Pelanggaran yang dilakukan berupa merokok dengan sembunyi-sembunyi, atau ada keluarga (tamu) yang datang dari luar desa

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Arifin, Masyarakat desa Bone-Bone pada tanggal 14 Februari 2015.

Bone-Bone yang menganggap sepele peraturan desa tersebut dan tetap merokok di kawasan desa Bone-Bone.<sup>62</sup>

Hal ini juga diakui oleh Bapak Abd. Wahid Bone-Bone, berdasarkan wawancara berikut:

Walaupun sudah tidak ada kios penjualan yang menjual rokok namun masih saja terjadi pelanggaran di desa Bone-Bone dikarenakan masyarakat perokok membawa rokok dari luar kawasan desa ini, apalagi jalanan desa Bone-Bone merupakan jalan poros untuk ke desa-desa lainnya, jadi biasa ada masyarakat dari luar yang merokok sambil mengendarai motor atau mobil, tanpa mengindahkan peraturan yang ada di sini.<sup>63</sup>

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di desa Bone-Bone khususnya peraturan desa tentang kawasan bebas asap rokok, bukan hanya dilakukan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di desa Bone-Bone tetapi juga dilakukan oleh masyarakat pendatang dari luar desa Bone-Bone. Mereka bahkan sudah membawa rokok dari luar kawasan desa Bone-Bone, dan mengkonsumsinya di dalam kawasan desa tersebut.

Seperti halnya pada pelaksanaan kebijakan atau peraturan pada umumnya, di mana kebijakan atau aturan dibentuk dengan sanksi atau hukuman yang diberikan bagi pelanggar aturan tersebut. Sanksi dibentuk untuk meminimalisir atau mencegah timbulnya pelanggaran akan kebijakan yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan kebijakan kawasan bebas asap rokok yang ada di desa Bone-Bone dibentuk pula sanksi tertentu yang diberikan bagi masyarakat yang ditemukan melanggar aturan atau kebijakan kawasan bebas asap rokok.

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Pak Bahrin, Tokoh Masyarakat desa Bone-Bone pada tanggal 12 Februari 2015.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Abd. Wahid, Kepala Desa Bone-Bone di kantor desa pada tanggal 14 Februari 2015.

Walaupun kebijakan ini dilengkapi dengan sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan untuk diberikan bagi pelaku yang melanggar pelaksanaan kebijakan kawasan bebas asap rokok tersebut, namun masih ada masyarakat perokok yang merokok di kawasan desa tersebut. Sanksi dari Peraturan Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok, yaitu:

- a) Setiap warga masyarakat yang ditemukan melanggar peraturan ini diberikan sanksi moral yaitu dipekerjakan tanpa imbalan di sarana umum seperti, masjid, jalanan umum, kantor Desa, Sekolah, Poskesdes, dan MCK umum serta fasilitas lain untuk kepentingan umum secara wajar dan adil.
- b) Bagi warga pendatang yang ditemukan melanggar peraturan ini diberikan teguran secara langsung oleh yang menyaksikan dan bilamana teguran tersebut di abaikan maka diberikan sanksi berikutnya berupa permintaan untuk segera meninggalkan Desa Bone-Bone.<sup>64</sup>

Metode yang dilakukan dalam pemberian sanksi bagi pelanggar aturan tentang kawasan bebas asap rokok di desa Bone-Bone tersebut berbeda dengan sanksi-sanksi yang diberlakukan pada kebijakan atau peraturan-peraturan pada umumnya yang kebanyakan sanksinya dikenakan denda berupa uang atau pidana, di desa Bone-Bone hanya memberikan sanksi moral yang tujuannya memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan juga bagi pelaku yang melanggar aturan.

---

<sup>64</sup> Pemerintahan Kabupaten Enrekang Kecamatan Baraka Desa Bone-Bone, Peraturan Desa Bone-Bone Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok. Bab VIII, Pasal 12, h. 6

#### 4. Dampak Peraturan Desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 bagi Perokok Pasif/Bukan Perokok

Dampak buruk dari rokok bukan hanya bagi perokok aktif, yang menghisap batang rokok tersebut. Tapi juga berdampak pada perokok pasif yang terkena asap yang dihasilkan oleh pembakaran rokok tersebut. Bahkan cenderung berdampak negatif dan buruk ke perokok pasif daripada perokok aktif. Hal ini bukan hanya merugikan diri sendiri tapi juga sudah merugikan orang lain yang tidak bersentuhan dengan rokok secara langsung. Maka dengan diterapkannya peraturan desa tentang kawasan bebas asap rokok, sangat didukung dan diterima langsung oleh masyarakat yang tidak merokok/perokok pasif. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Asliah pada wawancara berikut:

Bagus sekali diterapkannya peraturan desa ini, karena banyak sekali manfaatnya. Dulu suami saya selalu batuk-batuk tapi setelah berhenti merokok tidak batuk-batuk lagi, kalau naik gunung sudah tidak *ngos-ngosan*. Tidak hirup *miki* juga asap rokok yang dikeluarkan suami yang merokok. Masalah ekonomi jadi enteng karena waktu masih merokok, suami saya menghabiskan 1 bungkus rokok dalam 1 hari semalam.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dapat dijelaskan bahwa di samping ada masyarakat yang tidak setuju dengan diberlakukannya peraturan desa kawasan bebas asap rokok terutama bagi perokok, namun masih banyak pula masyarakat yang setuju dengan diberlakukannya peraturan desa ini. Karena berpengaruh terhadap ekonomi dan kesehatan. Pengaruhnya terhadap kesehatan dan ekonomi yaitu sudah tidak batuk-batuk akibat rokok dan pengeluaran bisa lebih irit.

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ibu Asliah, Ibu Rumah Tangga di desa Bone-Bone pada tanggal 14 Februari 2015

Bagi masyarakat yang tidak merokok atau perokok pasif, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa ini sangatlah bagus karena mereka dapat terhindar dari asap rokok yang dapat mengganggu pernapasan. Tetapi bagi masyarakat yg perokok, kebijakan ini justru membatasi ruang geraknya untuk merokok. Karena tidak boleh merokok di kawasan desa Bone-Bone, bahkan ada yang nekat untuk merokok secara sembunyi-sembunyi di kawasan tersebut. Mereka merasa tidak melanggar peraturan karena rokok itu legal dan larangan merokok hanya formalitas.

Berdasarkan teori kebijakan publik, dikatakan bahwa salah satu tahap yang dikemukakan oleh William N. Dunn akan menjelaskan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi dalam suatu wilayah yang diteliti oleh penulis. Salah satu tahap yang dimaksud yaitu tahap evaluasi. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan peraturan desa Bone-Bone dapat dijelaskan bahwa, Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok ini telah dilaksanakan dan diterapkan di desa Bone-Bone, namun pelaksanaannya masih belum maksimal. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pelaksanaan kebijakan kawasan bebas asap rokok ini, pemerintah desa harus bisa meningkatkan kesungguhan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan rasa tanggung jawab.

Selain itu, semangat kesungguhan para pelaksana kebijakan terkadang mengendur atau melemah dan oleh karenanya dibutuhkan usaha dari pembuat kebijakan untuk kembali meningkatkan semangat atau kesungguhan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugasnya. Untuk bisa menumbuhkan

disposisi para pelaksana kebijakan, faktor komunikasi kembali menjadi hal yang penting, komunikasi harus dilakukan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan dengan pembuat kebijakan untuk saling menyemangati dan saling meyakinkan dan mengingatkan tentang tujuan awal dan pentingnya kebijakan ini dilaksanakan.

Pemerintah desa Bone-Bone melakukan usaha atau cara untuk meningkatkan disposisi para pelaksana kebijakan agar bisa bersungguh-sungguh kembali dalam melaksanakan kebijakan kawasan bebas asap rokok. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah dengan melakukan diskusi lebih lanjut dan juga melakukan studi banding ke desa atau daerah lain yang masyarakatnya masih merokok. Hal ini kemudian dikaji dengan memperhatikan tingkat perekonomian, pendidikan dan akhlak atau perilaku masyarakat di desa tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi di desa Bone-Bone.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**



Berdasarkan pemaparan penulis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok di wilayah Desa Bone-Bone ini masih belum efektif penerapannya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menerapkan kebijakan tersebut mulai dari memanfaatkan media seperti poster, spanduk, dan stiker namun hasilnya kurang memuaskan. Dengan mengamati fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan desa tersebut, walaupun secara tegas sudah dilarang pemakaiannya dengan diterapkannya peraturan desa tersebut di atas dan dilengkapi dengan sanksi-sanksi yang sudah ditetapkan. Ini dibuktikan dengan masih biasa ditemukan masyarakat yang merokok secara sembunyi-sembunyi di tempat sepi seperti di kebun, di dalam rumah, dan tempat tersembunyi lainnya.
2. Adapun beberapa dampak yang dihasilkan oleh penerapan Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok, yang diterapkan di desa Bone-Bone sampai sekarang, yaitu : 1) Dampak terhadap Lingkungan, seperti menjadikan ruang dan lingkungan desa yang sehat dan bersih; 2) Dampak terhadap Kesehatan, seperti melindungi kesehatan anak-anak dan ibu-ibu, memperbaiki tingkat kesehatan warga dan menekan angka kematian; 3) Dampak terhadap Perokok Aktif, seperti membantu mereka untuk menjauhi dan berhenti dari merokok; 4) Dampak Terhadap Perokok Pasif/Bukan Perokok, seperti para perokok pasif mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih serta jauh dari udara yang terkontaminasi virus dan bibit penyakit.

Peraturan desa ini tentu membawa dampak tersendiri bagi masyarakat desa Bone-Bone, khususnya masyarakat perokok. Dengan adanya kebijakan ini, mereka merasa ruang geraknya dibatasi. Sehingga mereka masih biasa melakukan pelanggaran-pelanggaran, walaupun telah mengetahui kebijakan yang telah diterapkan dan sanksi yang diberikan jika melanggar. Tentu, permasalahan ini, kian menarik untuk diamati dan dilakukan penelitiannya di tahun-tahun mendatang, sebagai langkah lanjut dari penelitian yang dilakukan saat ini.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian tentang implementasi peraturan desa Bone-Bone No. 1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap rokok, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah desa Bone-Bone dalam melaksanakan kebijakan kawasan bebas asap rokok, yaitu:

1. Diharapkan agar penelitian ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah desa Bone-Bone dalam melaksanakan kebijakan di desa Bone-Bone khususnya kebijakan kawasan bebas asap rokok yaitu pemerintah desa Bone-Bone harus bisa menjalin komunikasi yang lebih baik dengan masyarakatnya, agar masyarakat dapat mematuhi dan melaksanakan kebijakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapapun bahkan bisa berhenti merokok.
2. Diharapkan agar pemerintah dan masyarakat setempat dapat membentuk kelompok yang menjadi pengawas terhadap berjalannya kebijakan ini. Kelompok ini dapat berasal dari masyarakat, artinya dilakukan pemberdayaan masyarakat yang nantinya dapat membantu dalam mengingatkan atau menegur masyarakat

yang kedapatan sedang merokok di desa Bone-Bone. Kelompok ini juga dapat menjadi sumber laporan terhadap pelanggaran peraturan yang berlaku di desa tersebut.

Bagi masyarakat atau pemerintah desa yang tidak mau mematuhi peraturan desa tersebut harus diberikan sanksi yang tegas. Karena tanpa sanksi sulit untuk melakukan perubahan perilaku. Serta sarana dan prasarana penunjang kesehatan di desa Bone-Bone dapat ditambah atau dimaksimalkan dengan baik agar bisa menunjang pelaksanaan kebijakan kawasan bebas asap rokok.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- A.F, Muchtar. *Matikan Rokok Hidupkan Semangat: Menuju Jalan Hidup Sehat Bermakna*. Bandung: Amanah Publishing House, 2005
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama Republik Indonesia. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Antlov, Hans. dan Sven Cederroth. *Kepemimpinan Jawa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2001.
- Awang, Azam. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa: Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Baraka dalam Angka Tahun 2012
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Enrekang dalam Angka Tahun 2013
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djohan, Djohermansyah, *Problematisasi Pemerintahan dan Politik Lokal*. Cet. I. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Harrison, Lisa. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Idris, *Bone-Bone: Desa di Atas Awan*, Kepala Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Enrekang, 2009.
- Iswan, Kaputra dkk. *Dampak Otonomi Daerah: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Kartasapoetra. *Desa dan Daerah dengan Tata Pemerintahannya*. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Mania, Sitti. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

- Marbun, B.N. *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses & Realita: Perkembangan Otda, Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2010.
- Noor, Muhammad. *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta: Interpena, 2012.
- N. Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Nugroho D, Riant. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputido, 2003.
- Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Pemerintahan Kabupaten Enrekang Kecamatan Baraka Desa Bone-Bone, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Akhir Tahun anggaran 2013
- Peraturan Pemerintahan Kabupaten Enrekang Kecamatan Baraka Desa Bone-Bone
- Peraturan Desa Bone-Bone Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kawasan Bebas Asap Rokok.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Supriatna, Tjahya. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Sutarto. *Dasar-Dasar Organisasi*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 1995.
- Syarifin, Pipin., dan Jubaedah Dedah. *Pemerintahan Daerah di Indonesia dilengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005.
- Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014). Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2006 tentang Kesehatan.
- Widjaja, HAW. *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2003.

Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

**Sumber Internet**

Siddiq, Muhammad Ronnurus. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Pengharaman Merokok.” <http://digilib.uin-suka.ac.id/3883/1BAB%201,V.pdf> (Diakses 15 Februari 2015).

Syamsuri. “Dampak Kebijakan Publik”. [http://kebijakanpublik12.Blogspot.com/2012\\_0401archive.html](http://kebijakanpublik12.Blogspot.com/2012_0401archive.html) (Diakses 06 Juni 2015)



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



➤ Peta Desa Bone-Bone



➤ Gerbang Desa Bone-Bone yang bertuliskan peringatan/larangan dari salah satu Peraturan Desa Bone-Bone



➤ Papan Reklame dan Papan Slogan tentang “Kawasan Bebas Asap Rokok”





- **Wawancara dengan Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Bone-Bone**



- **Wawancara dengan beberapa warga desa Bone-Bone**



- **Wawancara dengan mantan Kepala Desa Bone-Bone**



## Lampiran 1:

### Daftar Informan

No	Nama	Pekerjaan	Waktu
1.	Bapak Bahrun	Tokoh Masyarakat	12 Feb 2015
2.	Bapak Abd. Wahid	Kepala Desa Bone-Bone	14 Feb 2015
3.	Bapak Tahir	Tokoh Masyarakat	14 Feb 2015
4.	Bapak Arifin	Masyarakat	14 Feb 2015
5.	Ibu Asliah	Ibu Rumah Tangga	14 Feb 2015
6.	Bapak Idris	Mantan Kepala Desa Bone-Bone	20 Feb 2015
7.	Ibu Rahmatia	Perawat Poskesde	20 Feb 2015
8.	Bapak Hamdan	Kepala Urusan Umum Desa	14 Feb 2015
9.	Bapak Amri	Masyarakat	1 Mar 2015

## RIWAYAT HIDUP



NURUL QALBI WULANSARI M, lahir di kabupaten Enrekang pada tanggal 20 Januari 1993, anak ke empat dari lima bersaudara ini adalah anak dari pasangan Muslimin dan Wardanriani. Mulai mengikuti jenjang pendidikan di tahun 1997 di Taman Kanak-Kanak Pembina, dan melanjutkan pada jenjang sekolah dasar di SDN no. 137 Bamba Enrekang, dan tamat pada tahun 2005. Dan di tahun yang sama melanjutkan ke SMPN 10 Pare-Pare, tamat pada tahun 2008. Di tahun yang sama pula melanjutkan ke SMAN 1 Enrekang, dan tamat pada tahun 2011. Lalu melanjutkan pendidikannya pada jenjang Perguruan Tinggi di Kota Makassar di Universitas Islam Negeri Alauddin dan mengambil Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik. Kemudian bergabung dengan teman-teman mahasiswa Ilmu Politik 2011 dan ditempatkan di

kelompok IPO 3 dan 4. Dan penulis juga bergabung di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik (HMJ IP) dan Asosiasi Mahasiswi Ilmu Politik (AMIP).

